

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO **next**

INFORMASI BENAR

DI TENGAH PANDEMI

Edisi 21
September 2020



9 772655 993006



TIM REDAKSI

Pengarah:
Rosarita Niken
Widiastuti

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pimpinan Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan,
M. Taufiq Hidayat,
Verawati,
Annisa Bonita P.

Reporter:
Patricia Samantha S.
Yusuf

Fotografer:
Agus Yudi Harsono,
Doni Paulus Sumule,
Sri Indrati Noviansari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka,
Rahma Aulia Indroputri,
Lamza Rachmattunisa,
Tommy Tirtawiguna

Produksi:
Fahmi Trihatin J.,

Informasi Valid

September ini benar-benar bukan September ceria bagi saya. Selain harus dirawat kurang lebih sepuluh hari di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran karena terpapar COVID-19, di bulan ini saya kehilangan idola dan panutan saya: Bapak Jakob Oetama. Pak Jo, begitu biasa beliau disapa, meninggal dunia pada 9 September 2020 di usia ke-88 tahun. Selamat jalan, Pak Jakob. Terima kasih untuk segala warisan ilmu dan karyamu bagi Indonesia.

Sejak mulai membaca Harian Kompas pada usia SMP dan lebih tekun menikmati surat kabar tersebut di usia SMA hingga kuliah, saya makin mengidolakan sosok Pak Jo. Lulus dari sarjana di Yogyakarta, saya sempat mendaftarkan diri menjadi Wartawan Kompas. Sudah melewati beberapa tahapan, tapi akhirnya ternyata jalan hidup saya tidak langsung di Kompas. Saya kemudian bergabung dengan Kompas Gramedia Group (KKG), setelah menjadi wartawan Tribun Batam di tahun 2005 hingga 2006. Pilihan saya bergabung dengan KKG tidak terlepas dari kekaguman saya akan pandangan hidup, buah pikir, tulisan, dan ketokohan Pak Jakob.

Di antara sekian banyak, salah satu warisan Pak Jo adalah jurnalisme makna. Istilah ini bermula dan muncul dari pidato pengukenan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada untuk Jakob Oetama.

Menurut Pak Jakob, dewasa ini mulai terdengar pendapat yang bernada mengeluh. Bahwa akhirnya, masyarakat bukan saja kaya akan jaringan informasi yang teknologi maupun yang tradisional, yang lokal maupun yang global, masyarakat bahkan mulai kebanjiran informasi. Informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa hampir tidak ada yang mampu memastikan berapa banyak dan

berapa jenis informasi mampu diterima seseorang, atau suatu masyarakat dalam suatu waktu. Dewasa ini mulai terdengar pendapat yang bernada mengeluh tentang lubernya informasi. Lubernya informasi tidak lain berarti bahwa ada jenis informasi yang bukan saja tidak sempat diolah akan tetapi sama sekali tidak mungkin dipakai.

Sudah lebih dari 17 tahun lalu, Pak Jakob menyampaikan kekhawatiran itu. Saat ini makin menjadi-jadi. Kita benar-benar mengalami tsunami informasi. Miliaran informasi menerpa kita setiap detiknya. Dan kita semua tahu bahwa tidak semua informasi yang menghampiri kita tersebut adalah benar, bahkan banyak ahli yang mengatakan justru sebaliknya, lebih banyak informasi hoaks, informasi palsu yang datang berbarengan mendatangi kita, masuk ke gawai kita.

Dalam konteks hoaks, sejak Agustus 2018 hingga Agustus 2020, Kementerian Kominfo mengidentifikasi 6.640 isu hoaks yang beredar luas, dengan isu terbanyak di kategori kesehatan, kategori pemerintahan, dan kategori politik. Secara khusus, hingga hari ini tanggal 22 September 2020, Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 1.137 isu hoaks terkait COVID-19. Isu ini tersebar dalam 1.983 konten media sosial di empat platform mayoritas di Indonesia, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Sebaran terbanyak terdapat di Facebook dengan total 1.460 konten, diikuti oleh Twitter dengan

482 konten, YouTube dengan 21 konten, dan Instagram dengan 20 konten. Bekerja sama dengan platform media sosial, 1.723 konten dari total konten hoaks tersebut telah berhasil diturunkan.

Kita menyadari bahwa saat ini, ruang digital bersifat sangat terbuka dengan informasi yang serba gratis dan serba cepat penyebarannya. Hal ini membuat kekacauan informasi tidak terelakkan. Menurut para ahli, terdapat tiga jenis kekacauan informasi, yaitu Misinformasi, Disinformasi, dan Malinformasi. Misinformasi ialah informasi yang tidak tepat namun dibuat dengan kesalahan yang tidak disengaja, seperti keterangan foto, tanggal, statistik, alih-bahasa yang kurang tepat, atau ungkapan satir yang dianggap serius. Contoh: misleading content.

Disinformasi ialah informasi dengan konten yang sengaja direkayasa/dimanipulasi. Pelaku sengaja menyebarkan rumor atau teori konspirasi. Contoh: hoaks

Malinformasi ialah menyebarkan informasi "asli", akurat, dan faktual, namun secara sengaja dengan niatan untuk menyebarkan kebencian, mendiskreditkan pihak tertentu, atau menyebarkan data tanpa hak/konsen pemilikinya. Contoh: perundungan siber dan ujaran kebencian.

Majalah Kominfo Next edisi September 2020 ini mengangkat topik: Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi COVID-19. Untuk mengelaborasi topik ini, kami telah melaksanakan seminar daring pada 18 September 2020 dengan menghadirkan sambutan kunci dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Ibu Niken Widiastuti, dan 3 (tiga) pembicara yakni Prof DR Henri Subiakto (Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum), Bapak Hendra J Kede (Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat) dan Bapak Haris Suparto Tome (Ketua Asosiasi Kepala Dinas Kominfo Seluruh Indonesia/Kepala Dinas Kominfo Pemda Kabupaten Gorontalo).

Hasil liputan seminar daring tersebut dan ulasan-ulasan menarik lainnya kami sampaikan ke sidang Pembaca melalui edisi ke-19 Majalah Kominfo Next ini. Pastikan Anda selalu membaca Kominfo Next, Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi dan Informatika.

Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

4 Perspektif Menteri

6 Rak Buku

7 Teknologi & Gadget

12 Kominfopedia

14 Kabar dari Istana

18 Liputan Utama

30 Opini

40 Liputan Khusus

54 Kabar Seputar COVID-19

56 Portal Kominfo

66 Sorotan Media

72 Lambe Hoaks

Amunisi untuk Transformasi

Alhamdulillah, Puji Tuhan, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang APBN 2021 menjadi Undang-Undang Belanja Negara. APBN 2021 ini diproyeksikan mencapai Rp2.750 triliun atau 15,6 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut sedianya akan difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial.

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan anggaran Rp29,6 triliun, difokuskan untuk: (1) mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan; (2) mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; (3) mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta (4) mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan penyediaan akses internet pada sekitar 12.377 lokasi layanan publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI untuk mendapatkan pagu alokasi anggaran RAPBN TA 2021 sebesar Rp 16,9 triliun guna mendukung percepatan transformasi digital nasional tersebut. Diharapkan dengan anggaran tersebut, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Indonesia, khususnya wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) selama masa pandemi tetap dilakukan secara berkesinambungan.

Program itu di antaranya, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 11,1 triliun, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 3,6 triliun, pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp 530,9 miliar, program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp 260,6 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,3 triliun.

Penetapan APBN ini bagi kita setidaknya mengungkap tiga makna besar. Pertama, program percepatan transformasi digital yang direncanakan oleh Kominfo mendapatkan penegasan. Apa yang sudah menjadi cetak biru kementerian selama ini disetujui dan dipertegas oleh Presiden dan DPR, dan diberikan amunisi yang memadai untuk itu.

Kepercayaan kepada Kominfo ini adalah jawaban atas doa dan upaya keras kita selama ini. Untuk itu saya sampaikan apresiasi kepada para pejabat dan staf di lingkungan Kominfo yang telah mencurahkan segenap konsentrasi dan energi untuk mewujudkannya. Namun harus saya ingatkan bahwa ini bukan prestasi, namun justru baru merupakan awal dari ujian untuk menunjukkan komitmen dan kompetensi kita.

Kedua, sektor ini memang membuktikan sebagai sektor yang vital dalam situasi apapun. Sektor komunikasi dan informasi mengalami pertumbuhan hingga 10,88 persen selama pandemi COVID-19. Sektor ini menjadi satu-satunya sektor yang bertumbuh positif hingga di atas 10 persen dibanding sektor lain. Pada saat tekanan yang luar biasa ekonomi Indonesia di kuartal kedua minus 5,32 persen ternyata sektor Kominfo di kuartal I bertumbuh 9,6 persen, dan kuartal II bertumbuh 10,88 persen. Satu-satunya sektor yang bertumbuh positif dibanding sektor lainnya.

Ketiga, tanggung jawab juga bertambah berkali-kali lipat. Besaran anggaran tahun 2021 itu adalah sekitar tiga kali lipat anggaran tahun sebelumnya, tahun 2020. Berarti pula, kasarnya, beban kita juga minimal tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini adalah hal yang tidak mudah, mengingat tak jarang kita mengalami kendala dalam penyerapan anggaran. Juga tidak akan mudah karena situasi masih serba tak pasti akibat pandemi.

Oleh sebab itu, semua harus bekerja cepat agar program-program dapat berjalan dengan segera dan anggaran tersebut dapat terserap secepat mungkin dan program dapat dieksekusi dengan cepat, tuntas, dan berhasil guna. Bahkan, karena tahun 2021 sudah tinggal menghitung hari, tak ada salahnya jika persiapan harus sudah dimatangkan sejak dari sekarang. Menghadapi ketidakpastian hanya bisa dilakukan dengan membuatnya mendekati kepastian sedekat mungkin melalui perencanaan pasti yang kita siapkan sendiri.***



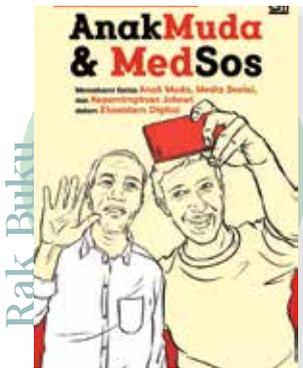


Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30



Penulis :
Alois Wisnuhardana
Nana Listyana

Anak Muda dan Medsos

Buku ini menjelaskan tentang fenomena media sosial di kalangan anak muda yang menjadi nyawa dan nafas mereka dan kaitannya dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo di era digital. Buku ini juga menjelaskan bagaimana kesan di media sosial kerap disalahartikan hingga efeknya tidak terbayangkan.

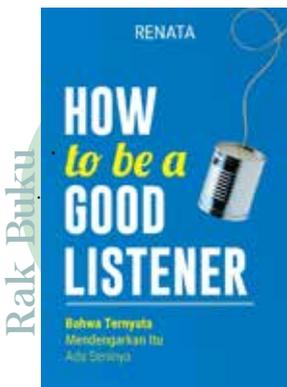


Penulis :
Young-Seon Cho, Denny
Supriyadi, Gang-Ho Kim

Why? Information Technology

Apakah kita pernah merasa jengkel saat alat tulis yang kita beli ternyata dijual lebih murah di toko sebelahnya? Jika kita punya informasi sebelumnya pasti tidak akan terjadi seperti itu.

Buku ini menceritakan bagaimana masyarakat informasi membuat internet berkembang dengan pesat dan internet dapat mengikat dunia menjadi satu. Tentang mengapa orang-orang mengembangkan segala hal tentang komunikasi untuk bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dari seluruh dunia.



Penulis :
Renata
Sony Adams

How To Be A Good Listener

Buku ini menjelaskan bahwa kemampuan dasar untuk mendengarkan itu sulit dilakukan dan memiliki seni tersendiri. Melalui buku ini anda dapat mempelajari dasar-dasar pemahaman untuk menjadi pendengar yang baik dan mendorong anda untuk mengembangkan kemampuan tersebut.

TEKNO LOGI & GAD GET

Rubrik gadget dan teknologi edisi ini akan disajikan sedikit berbeda. Jika biasanya kita membahas teknologi terkini dari seluruh penjuru dunia, kali ini kita akan membahas teknologi jaman *old* yang berkaitan erat dengan telekomunikasi dan informasi.

Tema ini terasa pas ketika dibahas pada Bulan September. Pasalnya, pada bulan ini, kita memperingati dua peringatan yang menjadi tonggak pelaksanaan telekomunikasi dan informasi di negeri ini. Tanggal 27 September kita peringati sebagai Hari Bhakti Postel, dan keesokan paginya, tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Hak Untuk Tahu atau *Right To Know Day*.

Merpati Pos



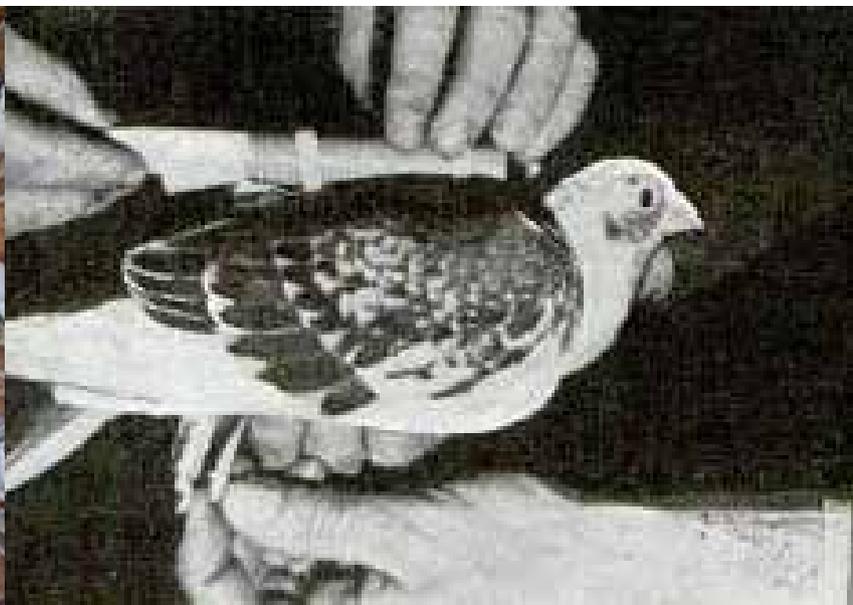
Ada hal unik dalam proses pengiriman informasi, terutama pada abad 17 dan 18, yaitu hadirnya binatang sebagai media dalam mengantarkan pesan. Binatang tersebut yaitu seekor burung yang dikenal dengan merpati pos atau *homing pigeon*.

Ketika belum ada media pengiriman informasi seperti telepon, ataupun sarana transportasi seperti pesawat atau bahkan sepeda motor, merpati pos menjadi sarana pengiriman informasi paling cepat di masa tersebut. Dengan meletakkan gulung kertas informasi di bagian tubuh sang merpati, seseorang bisa mengirimkan pesan secara cepat dari titik A ke titik B.

Walaupun pengiriman informasi untuk seekor merpati terbatas hanya dari titik A ke titik B saja (dan sebaliknya), merpati pos tetap menjadi primadona media pengiriman informasi, apalagi untuk informasi yang sifatnya sangat mendesak dan segera.

Untuk bisa 'dipilih' menjadi pengantar informasi, seekor merpati pos haruslah mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Seperti disampaikan sebelumnya, penggunaan merpati sebagai pengantar pesan terbatas pada dua titik pengiriman yaitu titik A dan titik B. Secara default, merpati pos hanya memiliki 1 *home base*, di mana merpati mengenali *home base* tersebut sebagai rumahnya.

Untuk bisa menambahkan rumah kedua yang akan dikenali merpati (titik B), biasanya seseorang akan bepergian dari titik A ke B bersama merpati tersebut, sampai akhirnya si merpati mengenali titik B sebagai rumahnya yang lain. Namun, ada juga yang melatih merpati untuk hanya mengenali satu titik saja (misal titik A) sebagai *home base*-nya. Pengirim pesan akan membawa merpati dengan *home base* titik A kemanapun dia pergi. Ketika ingin mengirimkan pesan ke titik A, maka merpati tersebut akan dipilih sebagai pengantar pesannya.



Asap/Api

Asap / Api merupakan salah satu bentuk pengiriman pesan yang paling tua. Media ini digunakan untuk mengirimkan pesan tertentu di tempat yang berjauhan. Biasanya, pesan yang dikirimkan berupa tanda bahaya, permintaan bantuan ataupun untuk mengumpulkan orang.

Contoh pemanfaatan media ini muncul dalam Trilogi Film Lord of The Rings: The Return of The King. Ketika itu, Gandalf yang sedang berada di Gondor ingin memberikan sinyal permintaan bantuan ke Raja di Rohan yang berada ratusan kilometer jauhnya. Seketika, dengan bantuan seorang hobbit, Gandalf berhasil menyalakan suar api Gondor dan pesannya terbaca oleh Raja di Rohan. Bayangkan jika harus mengirimkan pesan tersebut dengan berkuda yang tentunya akan membutuhkan waktu berhari-hari.

Di dunia nyata, pemanfaatan asap dan api sebagai media pengirim pesan lazim dilakukan oleh suku-suku asli penghuni Benua Amerika. Para penduduk lokal ini membuat kepul-an-kepul-an asap yang dihasilkan



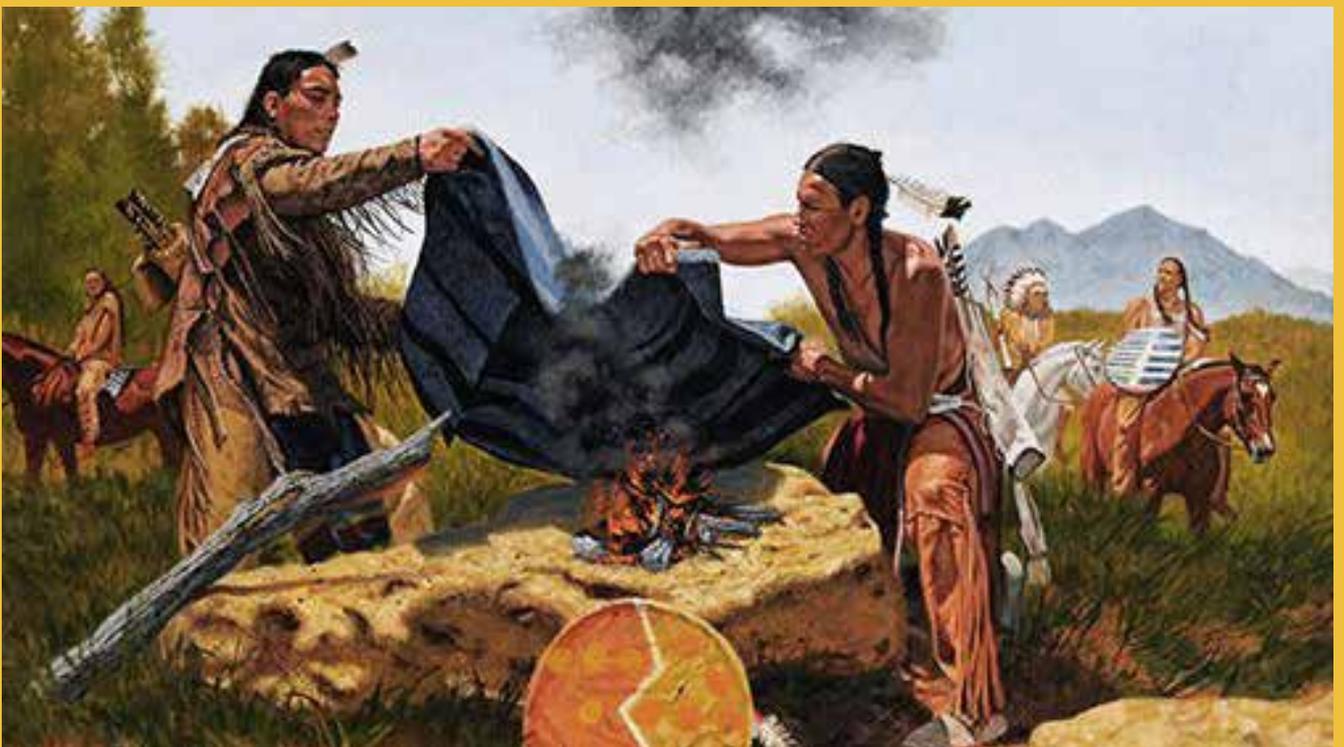
Sumber Foto : Pronto Communications

dengan menutup dan membuka sumber api, sehingga dihasilkan asal dengan pola-pola tertentu. Asap tersebut dibuat setinggi mungkin ataupun berada di area yang dimungkinkan untuk bisa dilihat dari tempat si penerima pesan.

Berbeda dengan kentongan, tidak ada standar yang tentang arti dari pola asap yang dibuat oleh pengirim pesan ini. Satu bentuk asap mungkin diinterpretasikan secara berbeda oleh suatu suku atau kelompok masyarakat.

Merujuk dari gearhunt.com, ada beberapa pesan yang umum untuk bisa diterjemahkan, seperti misalnya 1 kepul-an asap digunakan untuk menarik perhatian, 2 kepul-an asap berarti si pengirim pesan dalam kondisi aman, 3 kepul-an berarti ada masalah dan sebagainya.

Sumber Foto : https://www.askart.com/photos3/2014/AUG20140817_80477/166.jpg



Sandi Morse

Bagi Sobatkom yang ikut Pramuka, pasti tidak asing dengan sandi morse. Sandi ini ditemukan oleh Samuel Finley Breese Morse, seorang ilmuwan dan penemu berkebangsaan Amerika pada tahun 1838. Jika di Pramuka kita mengirimkan pesan sandi morse dengan menggunakan media peluit atau cahaya, di dunia telekomunikasi, sandi morse ditransmisikan menggunakan alat yang dinamakan telegraf.

Pesan yang dikirimkan menggunakan telegraf, dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal dan titik. Sinyal pendek ditulis sebagai titik (.) sedangkan sinyal panjang ditulis sebagai tanda hubung (-). Kode ini diubah menjadi sinyal listrik dan dikirim melalui kabel telegraf. Penerima pesan akan membaca sinyal listrik tersebut yang ditulis menjadi titik dan tanda hubung untuk kemudian diterjemahkan menjadi pesan.



Sumber Foto : Timeanddate.com

Sumber Foto : milwaukeeindependent.com

Era Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

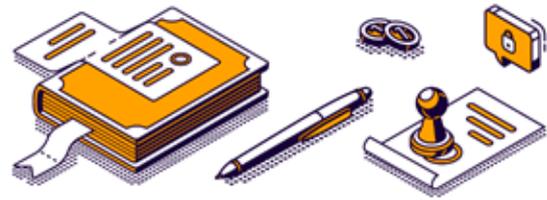
Data UNESCO menyebutkan bahwa pada tahun 1985, hanya ada 10 negara yang memiliki Undang-Undang yang mengatur akses ke informasi. Namun, pada tahun 2019, jumlahnya melonjak menjadi 126 negara atau mencapai 65% dari keseluruhan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia sendiri secara resmi mengatur tentang akses informasi pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Perjalanan keterbukaan informasi publik dimulai pada tahun 1998 ketika terjadi perubahan tatanan kehidupan pada berbagai aspek kenegaraan yang meliputi bidang sosial, politik, hukum, ekonomi yang kita kenal sebagai Reformasi 1998. Pada perjalanannya, reformasi 1998 berimbas pada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen UUD 1945) yang pada rentang waktu 1999 – 2002 terjadi sebanyak 4 (empat) kali perubahan. Amandemen UUD 1945 inilah yang menjadi pondasi bagi akses informasi di Indonesia, tepatnya pada Amandemen ke-2 yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000.

Pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 18 Agustus Tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, mengubah dan/atau menambah beberapa pasal/ketentuan dalam UUD 1945. Salah satu pasal yang mengalami penambahan ketentuan yaitu pasal 28 huruf (f) yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya Pasal 28 (f) UUD 1945, pada tahun 2005 draft Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik—yang pada awalnya bernama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik—mulai dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat hingga akhirnya disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).



Lahirnya UU KIP mengubah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap informasi. Jika sebelum adanya UU ini, “seluruh informasi tertutup kecuali yang dibuka”, maka setelah lahirnya UU KIP berubah menjadi “seluruh informasi terbuka kecuali yang ditutup”.

Badan Publik

UU KIP memiliki subyek yang salah satunya diistilahkan sebagai Badan Publik. Badan Publik merupakan lembaga/institusi yang dalam konteks UU KIP, diwajibkan untuk menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat (Pemohon dan Pengguna Informasi). Jenis-jenis Badan Publik didefinisikan sebagai berikut:

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Informasi Publik

Informasi menjadi objek dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini, dimana informasi yang menjadi konteks dalam UU KIP yaitu berupa Informasi Publik. Informasi Publik ini nantinya menjadi komoditas yang akan dimohonkan atau dikonsumsi oleh masyarakat baik sebagai pemohon maupun pengguna informasi.

Informasi Publik, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari definisi tersebut, batasan suatu informasi dikategorikan sebagai informasi yang dimiliki oleh badan publik yaitu ketika informasi tersebut:

- Dihilaskan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik; dan
- Berkaitan dengan penyelenggara / penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya

Informasi publik pada prinsipnya bisa diakses oleh masyarakat. Namun, UU KIP juga mengatur tentang jenis-jenis informasi yang tidak bisa dibuka ke publik yang disebut sebagai Informasi Yang Dikecualikan.

Untuk mengecualikan suatu informasi, suatu Badan Publik wajib untuk melakukan proses yang namanya Uji Konsekuensi. Uji konsekuensi ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap suatu Informasi Publik dengan merujuk pada Pasal 17 UU KIP tentang Informasi Yang Dikecualikan.

Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Masyarakat bisa mengakses informasi publik pada suatu badan publik dengan mengakses media-media yang dikelola oleh badan publik. Sebagai contoh, Kementerian Kominfo mempunyai kanal-kanal penyebaran informasi berupa website, media sosial dan juga majalah/jurnal bulanan yang menjadi sarana untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

UU KIP beserta aturan-aturan turunannya, mengatur cukup detail mengenai informasi-informasi apa saja yang harus diumumkan dan disediakan oleh Badan Publik. Lantas, bagaimana jika informasi yang diinginkan oleh masyarakat tidak atau belum tersedia di kanal-kanal informasi badan publik?

Tenang Sobatkom, UU KIP juga mengatur mengenai mekanisme yang disebut dengan Permintaan Informasi Publik. Masyarakat dalam hal ini setiap Warga Negara Indonesia bisa melakukan permintaan informasi kepada Badan Publik tentang informasi spesifik tertentu ataupun informasi yang belum tersedia di kanal-kanal informasi badan publik. UU KIP memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan respon terhadap setiap permintaan yang diajukan ke badan publik.

Jadi idealnya, sudah tidak akan ada lagi keluhan kesah masyarakat bahwa permintaan informasinya tidak direspon oleh badan publik. Karena, badan publik berdasarkan amanah UU KIP, diwajibkan untuk merespon setiap permintaan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dari saat ketika permintaan informasi diterima dan bisa melakukan perpanjangan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada badan publik, mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan proses penyelesaian permintaan informasi publik yang sangat lengkap ini, diharapkan hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan akses terhadap informasi dapat dijamin dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sumber Foto : www.presidenri.go.id



Sumber : <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-fasilitas-kesehatan-harus-mengacu-standar-penanganan-COVID-19-kementerian-kesehatan/>

Presiden: Fasilitas Kesehatan Harus Mengacu Standar Penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan

Presiden juga menyampaikan bahwa pola atau metode intervensi lokal harus dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus berupaya menekan laju penyebaran COVID-19. Standar pengobatan dan perawatan bagi pasien COVID-19 baik itu di ICU maupun ruang isolasi juga harus mengacu pada standar yang sama yang diberikan Kementerian Kesehatan.

“Ini penting sekali sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 September 2020.

Berdasarkan laporan terbaru yang diperoleh Presiden, kemarin, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 22,46 persen. Angka tersebut mendekati rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen. Kepala Negara meminta agar perkembangan ini dapat terus diperbaiki lagi.

Apabila dibandingkan dengan data bulan lalu, rata-rata kematian akibat COVID-19 di Indonesia juga menurun dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen. Meski perlu diakui bahwa angka tersebut masih di atas rata-rata kematian dunia yang berada pada angka 3,01 persen.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di negara kita bisa terus menurun,” kata Presiden.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga menyampaikan kembali kepada Komite Penanganan COVID-19 bahwa pola atau metode intervensi lokal harus dapat diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, intervensi lokal atau pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung, RT, RW, dan lingkup lokal lainnya tersebut jauh lebih efektif apabila dilakukan secara berulang dan sesuai dengan data penyebaran wilayah di satuan kecil.

“Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW, RT, kantor, maupun pondok pesantren saya kita itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang,” ucapnya.

Adapun yang berkaitan dengan rencana vaksinasi massal bagi masyarakat apabila vaksin COVID-19 telah tersedia, Kepala Negara meminta jajarannya untuk merencanakan betul seawal mungkin mengenai pelaksanaannya.

“Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, hingga siapa yang divaksin pertama. Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” tandasnya. (BPMI Setpres)

Perkuat Ekonomi Desa di Tengah Pandemi



Sumber : <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/perkuat-ekonomi-desa-di-tengah-pandemi/>

Pandemi COVID-19 saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan dampak dari pandemi yang melanda setidaknya di 215 negara di dunia.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa kondisi ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, salah satunya di desa-desa.

“Pandemi yang tengah kita hadapi harus menjadi sebuah momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa,” ujarnya melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2020.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran terkait. Pertama, Kepala Negara meminta agar seluruh skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial di desa seperti Program Keluarga Harapan, bantuan

sosial tunai, bantuan langsung tunai desa dan lain sebagainya harus berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Demikian halnya dengan pelaksanaan program padat karya tunai di pedesaan yang harus dikawal dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu. “Pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak COVID dan yang sangat membutuhkan,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menginstruksikan para jajaran terkait untuk mengonsolidasikan program-program kementerian yang dapat meningkatkan ekonomi desa. Masing-masing kementerian tidak boleh menjalankan program secara sendiri-sendiri dan harus mengintegrasikan diri ke dalam skema program yang saling mengisi satu sama lain.

“Misalnya Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan lebih produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, Kementerian Perhubungan konektivitasnya,

Kementerian Sosial mengenai penanganan warga yang kurang mampu, dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk sektor usaha kecil dan mikro,” ucapnya.

“Kalau tidak terintegrasi hasilnya akan tidak kelihatan. Oleh sebab itu, semuanya dijalankan dalam strategi besar yang solid dan terintegrasi,” imbuh Presiden.

Selain itu, masing-masing desa juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Warga-warga di desa harus diberikan ruang partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor-sektor unggulan desa seperti yang berkaitan dengan pertanian, wisata desa, hingga industri di pedesaan.

“Ini yang harus difasilitasi serta diberikan akses permodalan dan teknologi maupun di sisi keterampilan. Juga dorong kerja sama antardesa agar bisa masuk ke supply chain yang lebih luas sehingga pelaku usaha di desa bisa upskilling dan naik kelas,” tandasnya. (BPMI Setpres)

PRESIDEN RI



Proaktif Klarifikasi & Sebarkan Informasi Penyeimbang

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kementerian yang ikut mengawal lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan perhatian khusus terhadap informasi hoaks yang beredar selama masa pandemi COVID-19.

Jumlah kasus hoaks yang berkaitan dengan COVID-19 cenderung meningkat dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Untuk itu, selain melakukan klarifikasi, Kementerian Kominfo juga menyebarluaskan informasi penyeimbang.

"Hoaks ini menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman tentang bagaimana kita berhadapan dengan COVID-19," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti saat membuka Seminar Daring "Keterbukaan Informasi Publik: Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi," dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (18/09/2020).

Dari hasil pantauan Tim AIS Direktorat Pengendalian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, per 5 Agustus 2020 terdapat 1.016 informasi menyesatkan (disinformasi) dan hoaks mengenai COVID-19 yang beredar di melalui website, platform media sosial dan pesan instan.

Peredaran konten hoaks itu, menurut Sekjen Niken dapat menyebabkan dampak fatal bagi kesehatan maupun aspek-aspek lainnya. Bahkan, informasi yang tidak tepat dan beredar

luas bisa memengaruhi keberhasilan penanganan COVID-19.

"Oleh karena itu, guna menangkal kekuatiran di tengah masyarakat akibat maraknya hoaks dan disinformasi di media sosial, diperlukan peran pemerintah untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tersebut sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan," tuturnya.

Kepada seluruh masyarakat, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan pihaknya terus berupaya proaktif dalam mengklarifikasi konten hoaks yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, Kominfo terus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan menyusun klarifikasi atas hoaks yang beredar di masyarakat.

“Kami telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam dan mencegah penyebaran hoaks, termasuk di antaranya berkoordinasi dengan Kepolisian RI guna melakukan penindakan tegas kepada pembuat serta penyebar kabar bohong mengenai pandemi COVID-19,” jelasnya.

Selama masa pandemi COVID-19, Kementerian Kominfo sebagai *Government Public Relations* menyediakan informasi seputar COVID-19 yang terus diperbaharui setiap hari. Informasi itu disebarluaskan melalui seluruh kanal informasi Kementerian Kominfo baik *website* dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube sampai TikTok.

“Bahkan, akun resmi Instagram Kementerian Kominfo sudah menjadi *suggested page* informasi mengenai COVID-19. Setiap hari, melalui laman resmi kominfo.go.id, laporan isu hoaks bisa diakses oleh masyarakat melalui <https://kominfo.go.id/inihoaks>,” tandasnya.



Kami telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam dan mencegah penyebaran hoaks, termasuk di antaranya berkoordinasi dengan Kepolisian RI guna melakukan penindakan tegas kepada pembuat serta penyebar kabar bohong mengenai pandemi COVID-19



Wujud Keterbukaan Informasi

Upaya Kementerian Kominfo melakukan klarifikasi isu hoaks merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. “Langkah ini dilakukan sebagai bentuk informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat karena kebutuhan informasi mengenai COVID-19 sangat tinggi,” jelas Sekjen Niken.

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan, adanya pandemi COVID-19 turut merubah pola kerja yang biasa dengan tatap muka bertransformasi ke dalam ruang digital. Oleh karena itu, sebagai kementerian yang ikut mengawal lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Kominfo melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan layanan informasi secara digital bagi setiap individu yang ingin memperoleh informasi publik terkait laporan isu hoaks dengan mengunjungi <https://ppid.kominfo.go.id>.

“Jauh sebelum itu, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Kominfo telah bertransformasi, seluruh layanan informasi publik dilakukan secara *online*. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi layanan PPID dan menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat,” ungkapnya.

Sekjen Niken menuturkan, sejak akhir Maret 2020, saat kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diberlakukan Work From Home (WFH), seluruh petugas PPID tetap melaksanakan tugas pelayanan menerima permohonan informasi secara *online* sesuai dengan standar operasional prosedur layanan PPID.

“Terdapat juga aplikasi SIKELIP (Sistem Ticketing Layanan Informasi Publik). Aplikasi ini merupakan kanal layanan informasi publik berbasis *online* bagi para pemohon informasi yang ingin mengajukan permintaan informasi,” ungkapnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, masyarakat dapat mengakses informasi tentang

kebijakan strategis, rencana program/kegiatan, serta pengelolaan anggaran Kementerian Kominfo dengan beberapa informasi dikecualikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketat, terbatas, tidak mutlak.

“Kementerian Kominfo juga menyediakan layanan melalui aplikasi *chat* melalui WhatsApp PPID sebagai salah satu kanal layanan dalam menerima permintaan informasi publik dari masyarakat,” imbuhnya.

Dengan beragam layanan itu, meski berada di tengah pandemi COVID-19 menurut Sekjen Niken jumlah permintaan informasi yang masuk semakin bertambah. Dari Maret sampai dengan Agustus 2020, permintaan informasi yang masuk mencapai 204 permintaan. “Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan jumlah permintaan yang masuk di bulan yang sama tahun 2019 hanya sebanyak 86 permintaan informasi,” jelasnya.

Ajak Gunakan Hak Tahu

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan setiap warga negara berhak untuk tahu atas informasi dari setiap badan publik. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dari instansi tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengajak masyarakat menggunakan hak untuk tahu.



“Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang dan menjadi energi bagi akselerasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” jelasnya.

Mengenai hak warga negara untuk memperoleh informasi, Sekjen Niken menegaskan hal itu merupakan hak asasi manusia. “Dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Sekjen Kementerian Kominfo menjelaskan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

“Pengelolaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, memenuhi hak mendapatkan informasi yang berkualitas,” tuturnya.

Sekjen Niken menegaskan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki

peranan penting dalam menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Menurutnya, peran tersebut menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, menurut Sekjen Kementerian Kominfo badan publik penting untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang salah seperti hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

“Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang dalam Undang-Undang KIP berkedudukan sebagai badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana,” jelasnya.

PPID Kementerian Kominfo sejak awal berdiri di tahun 2010, telah menerima 5.334 permohonan informasi dengan 1.677 pemohon informasi. Sebanyak 97% permohonan telah dipenuhi dan dijawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam seminar daring tersebut, Sekjen Niken menyampaikan apresiasi kepada pemohon Informasi Publik PPID Kementerian Kominfo yang telah menjadi bagian dari perjalanan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Kominfo.

“Perjalanan PPID Kementerian Kominfo penuh liku. Di awal berdiri, PPID Kementerian Kominfo menerima 22 keberatan terhadap permohonan informasi publik. Namun PPID terus berbenah diri untuk terus melayani permintaan informasi dari masyarakat,” tutupnya.

Selain Sekjen Kementerian Kominfo, seminar daring juga menghadirkan pembicara Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Henri Subiakto, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J. Kede, dan Ketua Umum Asosiasi Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia Haris Suparto Tome. (hm.ys)



Rezim Keterbukaan Informasi Publik

Berubah Pasca Amandemen UUD 1945



Guna mewujudkan Indonesia menjadi empat besar kekuatan dunia pada tahun 2045 sesuai visi Presiden Joko Widodo, maka badan publik maupun lembaga negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Hendra J Kede, jika hal ini tidak diterapkan, maka akan menjadi penghambat untuk merealisasikannya.

“Apalagi saat ini kita diserang oleh COVID-19, ditambah dengan hoaks yang merajalela di mana-mana, tentu tantangan untuk merealisasikan impian ini luar biasa,” ujarnya dalam Seminar Daring “Keterbukaan Informasi Publik: Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi,” Jumat (18/09/2020).

Menurut Hendra, masyarakat bisa melakukan tindakan untuk pencegahan COVID-19 jika sektor komunikasi dan informatika dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan, khususnya untuk memastikan informasi yang dikonsumsi adalah informasi benar.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan saat ini Indonesia telah mengambil keputusan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mengubah rezim pengelolaan informasi. Menurutnya, jika sebelumnya seluruh informasi yang ada di dokumen-dokumen negara itu bersifat tertutup, saat ini ada yang dibuka dan diinginkan oleh masyarakat untuk keperluan mengembangkan dirinya.

“Rezim itu sudah diubah oleh pasal 28 ayat (f) UUD 1945, bahwa sejak Undang-Undang Dasar di-amandemen pada awal tahun 2000, maka seluruh informasi yang ada di dokumen-dokumen Badan Publik pada negara prinsip dasarnya terbuka, dan hanya informasi tertentu yang bersifat ketat, terbatas, berbatas waktu yang boleh dikecualikan menjadi tertutup,” urainya.

Untuk Kepentingan Publik

Pertimbangan substansi dasar dalam menentukan informasi menjadi tertutup adalah kepentingan publik, bahwa seluruh masyarakat Indonesia diberi hak untuk mengakses informasi tanpa terbatas terhadap seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen negara. Negara melalui lembaga-lembaganya boleh mengecualikan sebuah informasi menjadi tidak boleh dibuka dalam batas waktu tertentu hanya untuk pertimbangan melindungi kepentingan publik, sesuai definisi dalam pasal 17 ayat (f).

“Jadi, filosofi dasar dari lahirnya UU KIP No 14 pasal 17 itu adalah untuk melindungi publik, sehingga harus dikecualikan dari terbuka atau ditutup. Namun, perlu kita perhatikan (pada) pasal 17, yang dikecualikan adalah untuk melindungi publik. Itu substansi dasarnya. Itulah filosofi perjalanan rezim pengelolaan informasi ke depan semenjak tahun 2000,” ungkapnya.

Hendra menjelaskan, sebuah informasi untuk kepentingan publik diklasifikasikan sebagai informasi yang tersedia setiap saat dalam keadaan tidak normal. Sedangkan informasi yang tersedia setiap saat yang tersimpan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menjadi informasi yang serta merta. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk menggunakan pertimbangan situasi darurat COVID-19 dan penggunaan situasi *extraordinary*.



“Melindungi publik dalam keadaan normal tentu berbeda dengan melindungi publik dalam keadaan tidak normal. Sebuah informasi di dalam keadaan normal boleh jadi untuk melindungi publik itu perlu ditutup. Tapi, dalam keadaan tidak normal dalam melindungi publik itu mungkin dibuka,” jelasnya.

Menyambung pernyataannya, Hendra menyatakan, PPID dalam keadaan darurat berhak menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik, karena sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk menetapkan informasi yang menyebutkan masyarakat. PPID, lanjutnya, bukan hanya fokus mengatakan “kami” melindungi masyarakat. Sebab, melindungi masyarakat sudah ada hukum tertinggi bahkan lebih tinggi dari UUD.

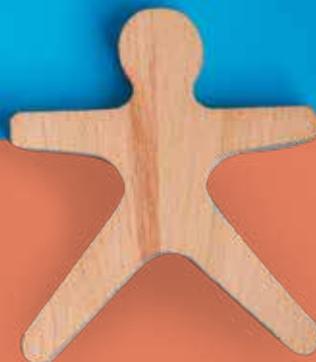
“Itu saya kutip dari pernyataan Profesor Mahfud MD. Presiden Jokowi pun sudah memberikan kebijakan politik dengan mengambil keputusan dengan mengambil keputusan *extraordinary*. Kepala Negara menyampaikan, kalau Anda mengubah undang-undang boleh. Silakan ajukan Perpu ke saya kalau itu memang diperlukan untuk mengendalikan COVID-19 ini,” paparnya.

Adaptasi Kebiasaan Baru

Dalam Seminar Daring tersebut, Hendra menegaskan bahwa adaptasi kebiasaan baru bukan hanya memakai masker, jaga jarak, namun termasuk juga beradaptasi dengan sebuah informasi yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup.

Setelah semuanya itu diterapkan, maka informasi yang sebelumnya tertutup atau dikecualikan menjadi terbuka di zaman COVID-19. Yang sebelumnya bersifat serta merta, menjadi tersedia setiap saat. Yang sebelumnya tersedia setiap saat menjadi berkala, yang sebelumnya berkala dan tersedia setiap saat menjadi serta merta. Serta, informasi yang sebelumnya dikecualikan berubah menjadi serta merta.

“Hal tersebut diputuskan oleh PPID, dan merealisasikan serta beradaptasi dengan hal itu merupakan bagian dari Adaptasi Kebiasaan Baru. Itulah makna hakiki informasi yang benar dan bukan hoaks. Kita akan bergotong-royong agar dampak COVID-19 tidak menghadang semua ketercapaian Indonesia untuk menjadi 4 besar kekuatan dunia pada 2045,” tutupnya. (hm. ys)



Turun ke Desa

Cara Diskominfo Kabupaten Gorontalo Tangkal Hoaks

Jakarta, Kominfo – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membentuk satgas anti hoaks untuk menekan peredaran berita bohong yang sangat buruk memengaruhi tatanan masyarakat.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kadis Kominfo se-Indonesia, Haris Suparto Tome, menegaskan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dapat membuat informasi yang beredar harus disikapi dengan bijak.

Menurut Haris, Satgas anti hoaks ini dibentuk pada tahun 2019 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 226/200/IX/2019 dan dilantik oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik - Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Selamat Sembiring pada tahun

2019. Berdasarkan SK tersebut, mereka diberi tugas untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat jika ada informasi yang berkembang di media sosial.

“Kita berikan mereka hal-hal yang bisa mereka gunakan untuk membendung isu hoaks yang beredar di masyarakat,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Daring Keterbukaan Informasi Publik: Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi,” yang disampaikan secara daring, Jumat (18/09/2020).

Haris menuturkan, dengan adanya SK itu, ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan yakni: mempercepat penyebaran informasi terutama yang berhubungan dengan kebijakan maupun penanganan COVID-19, responsif dalam menanggulangi, memberikan klarifikasi terhadap isu yang beredar, menyediakan platform untuk komunikasi dua arah kepada masyarakat untuk membuka laporan pengaduan, serta memberikan sosialisasi dalam menerima informasi.

“Satgas anti hoaks ini melibatkan seluruh elemen masyarakat yang tersebar di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dengan total 231 orang,” ucapnya.

Selain membuat surat keputusan, Haris beserta jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo turut menggelar desiminasi informasi secara bergilir di desa-desa. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi maraknya berita bohong yang beredar di masyarakat

“Kita mengumpulkan mereka guna menyampaikan hal-hal yang patut disampaikan kepada masyarakat yang beraktivitas di desa. Mereka juga bisa mengakses langsung informasi dari desa,” tuturnya.

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Haris melanjutkan, agar informasi dapat cepat tersampaikan kepada masyarakat di desa, maka pihaknya juga memanfaatkan layanan PPID untuk menyampaikan diseminasi informasi kepada teman-teman yang berada di SKPD di OPD-OPD untuk menghadirkan konten-konten yang terkait dengan isu-isu penyelenggaraan pemerintahan.

“Kadang-kadang, pemerintah ini sudah bekerja sangat maksimal, tetapi informasinya tidak sampai kepada publik. Karena apa? Media-media mainstream yang sering digunakan oleh publik tidak pernah kita sentuh. Banyak pegawai kita, bahkan mungkin pimpinan OPD-nya lebih suka berfoto *selfie* di Facebook daripada mempublikasikan dan menginformasikan apa yang telah dikerjakan di instansinya,” paparnya.

Dari data yang ada, Haris menyebutkan pengguna medsos di Indonesia berjumlah sekitar 160 juta orang, urutan ketiga terbanyak yang menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, rata-rata penggunaan medsos orang Indonesia mencapai 7 hingga 8 jam per harinya. Hal ini menandakan bahwa publik kita mengakses informasi pada media sosial yang mereka gunakan, sehingga isu yang berkembang sangat cepat di medsos

Oleh karena itu, dengan masifnya penggunaan media sosial, menurut Haris perlu dilakukan berbagai langkah untuk merespon terhadap isu yang berkembang saat ini.

“Maka, semestinya kita sudah punya akun yang terverifikasi. Bisa diyakini bahwa itu adalah informasi yang benar berasal dari pemerintahan. Jadi, kita harus cepat mengklarifikasi dan mengambil alih penyebaran isu itu,” jelasnya.

PPID, lanjut Haris, memiliki fungsi tidak hanya berkuat pada pengklarifikasian berita mana yang bisa dikonsumsi oleh publik atau menunggu permintaan

publik, namun dapat juga mengambil peran dengan memberikan informasi yang benar terlebih dahulu. Dengan cara misalnya berdasarkan penelitian-penelitian yang ada.

“Di samping tugas pokok PPID sesuai SOP, PPID setiap saat menerbitkan informasi berupa konten-konten terkait isu dan penyelenggaraan pemerintahan,” imbuhnya.

Haris menambahkan, PPID juga mempunyai tugas untuk memberikan dukungan dan tanggung jawab dalam memberikan akses informasi dan juga sebagai garda terdepan dalam memberikan penjelasan mengenai isu/berita menyesatkan kepada masyarakat.



Jaring Internet Sehat, Libatkan PKK

Guna menanggulangi informasi sekarang ini yang bertransformasi sangat cepat, menurut Haris, edukasi melalui literasi digital menjadi solusi untuk pertahanan dalam mengkonfirmasi informasi yang ada.

Bicara soal informasi, ia menambahkan, Dinas Kominfo memegang peran dan fungsi dalam meningkatkan literasi bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat pun diharapkan dapat bijak menyaring setiap informasi yang diterima.

“Literasi digital dilakukan dengan berbagai macam hal, misalnya peningkatan literasi melalui internet sehat kepada keluarga, kita melibatkan Tim Penggerak PKK karena, mereka punya kaki tangan seperti Dasawisma,”

Dalam pemaparannya, Haris menjelaskan Dasawisma merupakan sekelompok orang yang berhubungan

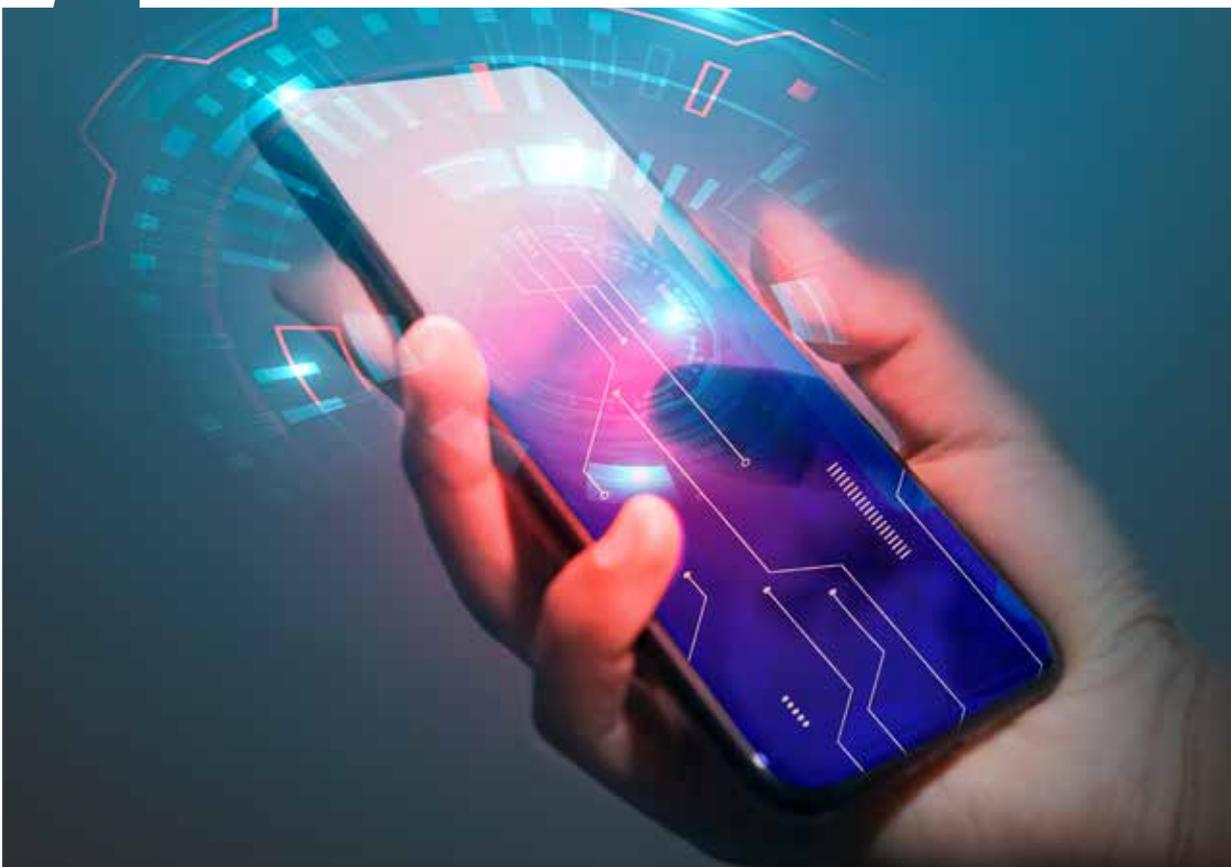
dengan masyarakat di desanya baik dari segi kesehatan, perekonomian, sosial kemasyarakatan, di-handle semuanya.

“Maka, kita memanfaatkan itu untuk menyampaikan informasi baik dan benar dari pemerintah. Namun demikian, harus diakui bahwa ada beberapa hal yang bermasalah di sana, terutama dalam hal terbatasnya SDM dan anggaran di daerah, Sehingga, kami mendorong berulang kali agar supaya ada sinergitas antara pusat dan daerah,” jelasnya.

Terkait SDM, Haris menyatakan memang harus juga dipahami bahwa SDM di daerah tidak begitu komprehensif dalam memberikan penjelasan di media sosial, sehingga menurutnya perlu diberi muatan informasi tentang hal-hal yang telah dikerjakan oleh pemerintahan, juga oleh publik, termasuk untuk mematahkan narasi yang selalu berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Haris mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesamaan narasi dengan kejadian yang terjadi. Misalnya, salah satu yang seringkali terjadi adalah munculnya informasi mengenai orang yang divonis tertular COVID-19 dan adanya berita yang menyebutkan bahwa seseorang meninggal karena terkena virus corona. Tetapi, masyarakat mengetahui orang tersebut mengidap penyakit lain yang diderita bertahun-tahun.

“Hal-hal demikian perlu kami carikan narasi yang baik untuk memberikan penjelasan bahwa COVID-19 memang ada. Itu yang kita coba lakukan bersama dengan keterlibatan tokoh yang kami rekrut dari Satgas anti hoaks itu,” tandasnya. (hm.ys)



Cegah Penyebaran Hoaks, SAM Kominfo: Perlu Literasi Digital dan Penindakan



Jakarta, Kominfo - Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, kebenaran informasi tentang Virus Corona menjadi begitu penting. Namun, masih banyak masyarakat yang membagikan dan menyebarkan informasi hoaks tanpa melihat isi informasi dan sumbernya yang benar, sehingga orang lain yang mendapatkan kabar tersebut bisa dirugikan.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menjaring lebih dari seribu konten hoaks tentang COVID-19 selama pandemi di Indonesia. Salah satu kunci sukses menghadapi COVID-19 adalah masyarakat jangan mempercayai hoaks beserta teori konspirasinya. "Kunci sukses menghadapi Virus Corona, maka mari kita ajak masyarakat itu tahu bahaya COVID-19,

tahu cara menghindari," ujar Staf Ahli Menteri Kominfo (SAM) Bidang Hukum, Henri Subiakto dalam seminar daring bertajuk Keterbukaan Informasi Publik 2020: Pentingnya Informasi Benar di Masa Pandemi, Jumat (18/09/2020).

Literasi Digital

Lebih lanjut, SAM Henri menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan tiga hal untuk mencegah penyebaran hoaks yakni dengan cara melakukan literasi digital, kemudian klarifikasi, dan ketiga adalah penegakan hukum.

SAM Henri menuturkan, Kominfo bersama *stakeholders* terkait mencoba melakukan klarifikasi apabila muncul sebuah informasi tidak benar atau hoaks. Kerjasama itu dilakukan dalam konteks Digital Literasi sekaligus upaya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat," ungkapnya.

"Tahun 2021 Program Literasi Digital Kominfo banyak sekali. Karena masyarakat yang menggunakan internet akan semakin banyak, kita akan melakukan Literasi Digital yang cukup intensif supaya masyarakat betul-betul bisa mengendalikan konten. Apabila mereka anggap berbahaya mereka tidak akan pakai," tandasnya.

Tak hanya itu, SAM Henri menilai, untuk menyelesaikan permasalahan terkait hoaks, Kominfo membutuhkan kerjasama yang melibatkan semua elemen.

"Kominfo tentu saja tidak bisa selesaikan semuanya langsung 100%. Kita butuh bantuan dari masyarakat, para pelajar, akademisi, Pemda, dan Diskominfo untuk tetap sama-sama, karena memang yang namanya dunia digital medsos itu luas sekali. Kalau perlu, sampaikan ke aduan konten jika ada penyimpangan-penyimpangan agar ada penegakan hukum yaitu di-delete atau diblokir dan diputus aksesnya," jelasnya. Untuk itu, literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki keterampilan untuk menyerap informasi, termasuk bagaimana cara mengecek fakta (*fact checking*).

Guna menyaring berita palsu yang bertebaran di ruang digital, Kominfo memanfaatkan bantuan mesin pengais untuk melacak konten hoaks dan kabar misinformasi yang beredar tersebut. Setelah menemukan konten yang dimaksud, Tim Cyber Drone Kominfo melakukan verifikasi dan validasi fakta untuk selanjutnya melabeli stempel hoaks atau disinformasi pada konten tersebut untuk dipublikasikan pada laman resmi kominfo.go.id dengan menyertakan artikel tentang informasi yang benar.

untuk menyelesaikan permasalahan hoaks, Kominfo membutuhkan yang melibatkan semua elemen

Upaya Penindakan

Untuk penegakan hukumnya, Henri mengatakan ada dua langkah yang dilakukan Kominfo. Pertama, terhadap penyebar hoaks, pihaknya bersama dengan Bareskrim Polri akan mengejar pelaku penyebar hoaks jika memang terbukti melanggar pasal yang masuk dalam kriteria hukum perbuatan pidana. Misalnya, pencemaran nama baik, penyebaran kabar bohong yang berpotensi memunculkan keonaran pada Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946.

"Kedua, hoaks yang isinya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan pada individu atau kelompok orang berdasarkan suku agama, ras, dan antar golongan itu juga melanggar UU ITE pasal 28 ayat 2. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap konten, ditangani Kominfo dengan melakukan take down kemudian pemilik aplikasinya akan diberi peringatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Henri menyebutkan dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan penyebaran hoaks atau pornografi, Kementerian Kominfo merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. "Di Dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 ada klausul pasal yang bisa memberikan sanksi kepada aplikasi perusahaan aplikasi yang membiarkan konten-

kontennya itu melanggar peraturan perundang-undangan termasuk menyebarkan misalnya pornografi. Misalnya, kalau ada pornografi dibiarkan di Facebook dan Twitter, jika terbukti kita bisa memperingatkan mereka, kemudian menurut PP tersebut kita bisa juga menerapkan dan mengenakan denda kepada perusahaan itu," tandasnya.

Dalam seminar daring tersebut, SAM Henri menyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap kasus hoaks.

"Ini yang sudah ditegakkan oleh teman-teman di Polda. Sudah 104 kasus yang ditorsangkakan, boleh dikatakan akan diadili pelaku-pelaku penyebar hoaks itu. 104 kasus dari berbagai Polda terhitung sampai 11 September kemarin," imbuhnya.

Seminar Daring Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diselenggarakan oleh PPID Kementerian Kominfo dibuka secara resmi oleh Sekjen Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti.

Adapun narasumber lainnya pada seminar daring ini adalah Wakil Ketua KI Pusat RI Hendra J. Kede, dan Ketua Umum Asosiasi Kadiskominfo se-Indonesia Haris Suparto Tome. (hm.ys)

lahan terkait kerjasama n.



OPINI

OPINI



**FX BAMBANG
IRAWAN**

Redaktur KominfoNext
Humas BAKTI

Influenza

Influenza



Influenza dianggap sebagai sakit-penyakit yang sepele. Itu sekarang. Seabad yang lalu, tahun 1918, wabah penyakit ini juga semematikan COVID-19 yang sedang kita alami sekarang.

Saat itu, Flu Spanyol adalah jenis pemicu wabahnya. Bahkan, sejarah mencatat bahwa dalam abad ini, dunia sudah dijangkit tiga kali pandemi influenza atau flu, dan semuanya memakan jutaan jiwa. Beberapa galur virus yang mematikan adalah Flu Babi, Flu Burung, Flu Hongkong, Flu Asia, dan lain-lain.

Menurut Wikipedia, kata influenza berasal dari bahasa Italia yang berarti "pengaruh". Hal ini merujuk pada penyebab penyakit. Pada awalnya disebut bahwa penyakit ini disebabkan oleh pengaruh astrologis yang kurang baik. Setelah "disiplin ilmu" astrologi, giliran disiplin ilmu klimatologi membuat namanya dimodifikasi menjadi "*influenza del freddo*", yang berarti "pengaruh dingin".

Kata influenza pertama kali dipergunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut penyakit yang kita ketahui saat ini pada tahun 1703, oleh J Hugger dari Universitas Edinburgh dalam tesisnya yang berjudul "*De Catarrho epidemio, vel influenza, prout in India occidentali sese ostendit*".

Istilah yang sebenarnya kurang "medis" ini digunakan selama puluhan tahun kemudian.

Beberapa waktu lalu, ramai orang membicarakan istilah *influencer*. Istilah ini merujuk kepada orang yang berpengaruh, sesuai namanya. Stop sampai di situ? Belum. Predikat itu kemudian disematkan kepada orang yang berpengaruh, dan karenanya bisa mempengaruhi orang lain, melalui media.

Sebenarnya stop sampai definisi itu sudah sah. Namun ada yang lebih tajam lagi: *influencer* adalah orang yang berpengaruh dan punya kapasitas mempengaruhi orang melalui media sosial.

Kemudian pemahaman orang jadi seperti ini: jadi *influencer* itu terhormat, namun jika jadi *influencer* di media sosial, maaf, kok sepertinya ada "bau-bau amisnya" yak?

Seakan-akan *influencer* di media sosial adalah mereka yang kerjanya selalu menyulut huru-hara di jagad maya agar menarik perhatian. Ya, jujur *literally* ada yang begitu sih, *like* gak peduli dampak buruknya yang penting viral gitu deh....

Sampai di sini, *tone* sudah agak negatif. Namun ada yang lebih "kotor" lagi, yaitu jika ia mengerjakan pekerjaan *influencer* bagi kepentingan pemerintah. Pada level ini tuduhan mulai "ngaco", mencampuradukkan *influencer* dengan *buzzer*. Beda paling jelas keduanya adalah pada profilnya.

Seorang *influencer* harus orang yang jelas sosoknya, dikenal karena kompetensinya, dan mendapatkan kapasitasnya sebagai *influencer* dalam jangka waktu yang tak pendek. Sedang *buzzer*, karena hanya berperan sebagai pendongeng atas sebuah produk atau isu, tak memerlukan kenengratan seorang *influencer*, tolok ukurnya hanya *follower*, dan umumnya orang tak peduli dia mendapatkan kapasitas sebagai *buzzer* dengan metode yang positif atau negatif, yang spartan atau yang instan.

Kemunculan "galur" *influencer* ini sangat "teknologiah". Kita tahu, medium penyiaran dan diseminasi informasi telah berubah drastis, bergeser ke media sosial.

Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook, misalnya. Pelakunya juga berubah. Di tengah galaunya media massa mengikuti perubahan ini, ternyata orang menyambut gembira munculnya simplisitas penyiaran dan konten yang bersifat personal. Kalau dulu *exposure* artis hanya mengandalkan media, sekarang artis bisa mem-broadcast dirinya sendiri. Mereka bisa meng-hire kru sendiri, manajemen konten sendiri, dan menikmati *revenue* dari *platform* medsos sendiri.

Media massa, cetak dan *online*, kelimpungan. Ongkos *overheat* sangat tinggi. Pendapatan digerus oleh para *content creator* yang bermunculan, dengan konten sederhana tapi "*relate*" dengan penonton. Seperti belanja ikan cupang, misalnya.

Wajar jika kemudian muncul upaya dan usulan untuk mencoba meminta *level of playing field* yang sama. Ada yang lewat *pressure* pemberitaan, ada yang secara resmi menggugat regulasi.

Pemerintah "jadi korban". Sudah benar jalannya, yaitu secara teknologiah mengikuti pergeseran sosialisasi dan edukasi melalui medium *multichannel*. Namun giliran menggunakan medium baru nan efisien, seperti *influencer*, jadi sering dipersoalkan.

Eh tapi, omong-omong, apa hubungannya influenza dengan *influencer*? Ya, sebenarnya nggak ada hubungan langsung, sih. Hanya saja, kalau kedua kata itu kita dengar diucapkan anak-anak gaul Jakarta Selatan, jadinya kok susah dibedakan ya?***

OPINI

OPINI



ARIS KURNIAWAN

Penggerak Swadaya
Masyarakat Ahli Madya
Direktorat Pemberdayaan
Informatika DJ Aptika
Kementerian Kominfo

Gotong Royong Adalah Koentji



Tentang PATRIOT:

<https://patriot.web.id>
Instagram: @pemberdayaan.kapasitas
Kontak teknis ABDI 3 ON:
Hari Purwadi - 08157664164

“..kita mau bikin model pembelajaran jarak jauh tanpa kuota pake konsep konvergensi media nih mas, boleh ijin pake aplikasi ABDI di patriot.web.id ya...”

Tanggal 29 Juli saya menerima pesan WhatsApp dari M. Rifky, seorang pegiat Radio Komunitas Lampung. Langsung saya jawab *“..lanjut Mas, tolong bantu koordinasi sumber daya di lapangan kita, langsung terapkan saja, bras bres das des*”*.

Dalam kondisi darurat, saya yakin perlu kecepatan eksekusi terkait permasalahan model pembelajaran/pendidikan jarak jauh (PJJ) yang ramah kantong. Dengan harapan, hasilnya bisa membantu murid SDN 2 Margosari, Pagelaran Utara, Lampung, dalam menjalankan proses belajar jarak jauh mereka. Sekaligus berharap hasilnya bisa menginspirasi munculnya gerakan kolaborasi atau gotong-royong serupa di daerah lain.

Kebetulan kami sudah bekerja bersama cukup lama dengan Komunitas PatroT (Program Akselerasi Teknologi Robotika dan IoT) yang menjadi motor penggerak kegiatan ini, sehingga saat ide ini mengemuka relatif mudah dalam proses koordinasinya. Proses persiapan terus berlanjut dengan *webinar PJJ online* tanpa kuota di tanggal 19 Agustus, lalu di tanggal 25 Agustus 2020 kita mulai kirimkan tim teknis untuk mendampingi tim lokal yang sudah bersiap di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu.

Sektor pendidikan dan ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat Pandemi COVID-19. Pembelajaran sementara dihentikan, dengan pertimbangan faktor kesehatan dan keselamatan bagi seluruh pihak. Berdasarkan data dari Kemdikbud, setidaknya ada 68 juta peserta didik mulai tingkat dasar hingga tingkat atas yang terdampak langsung kondisi tersebut.

Pandemi COVID-19 juga memukul sektor ekonomi, berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun dan mengganggu kemampuan murid untuk bisa menyiapkan gawai dan juga kuota sebagai prasyarat mengikuti PJJ selama pandemi.

Pembelajaran Jarak Jauh secara daring pun diluncurkan sebagai strategi agar siklus pembelajaran tetap berjalan di tengah pandemi ini. Fenomena ini menjadi pertanda positif

terjadinya akselerasi transformasi digital dalam sektor pendidikan, walaupun dalam pelaksanaan kemudian muncul banyak permasalahan yang dirasakan, di antaranya:

- 1 Lokasi peserta didik jauh tersebar, tidak meratanya coverage sinyal telekomunikasi
- 2 Berada dalam area *blank spot coverage*
- 3 Ketidakmampuan memiliki gawai pintar dan beban biaya kuota paket data.

Diawali dengan diskusi informal para pegiat dan penggiat TIK terkait kondisi ini, semua sepakat bahwa dibutuhkan strategi alternatif lain untuk menyempurnakan konsep teknis Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring yang mampu mengatasi 3 permasalahan tersebut.

Untuk poin 1 dan 2, teman-teman dari BAKTI Kominfo sudah dan terus melakukan program solutif. Namun terkait kendala nomor 3 sepertinya kita bisa ikut membantu memberi alternatif solusi.

Perhatian khusus bagi kelompok dengan ketidakmampuan untuk memiliki gawai pintar dan beban biaya kuota paket data kami sepakati sebagai sasaran utama. Meskipun bukan mayoritas, tapi mereka sebagai warga bangsa juga punya hak belajar yang sama selama pandemi ini. Apalagi bukan sekali dua kali di linimasa muncul kasus di mana seseorang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena mencuri gawai atau melakukan tindak kejahatan dengan alasan ingin menyediakan gawai dan kuota bagi anak-anaknya. Hal ini makin menguatkan semangat gotong-royong kami untuk segera ikut berkontribusi.

Melalui gotong royong antara Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kemkominfo, Ditjen SDPPI dan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, Komunitas PATRIoT, Relawan TIK, Jaringan Radio Komunitas Lampung, Dinas Kominfo Kab. Pringsewu, Radio Suara Pringsewu, Pemerintah Desa Margosari, SDN 2 Margosari dan RAPI, terlahirlah ABDI PATRIOT – 3 ON.

*das des bras bres adalah semangat eksekusi yang didasari oleh keyakinan akan sesuatu yang bermanfaat tak boleh ditunda-tunda (istilah sering dipakai di wilayah Banyumas dan sekitarnya)



Pembagian peran mengalir begitu lancar, di mana Direktorat Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kemkominfo menyiapkan dukungan fasilitas kegiatan melalui pemanfaatan anggaran pemberdayaan kapasitas untuk mendukung kegiatan ini. Ditjen SDPPI dan Balmon SFR Lampung di bawah koordinasi Ibu Enik Sarjumanah juga langsung turun tangan memastikan tertibnya pemanfaatan frekuensi sesuai aturan UU.

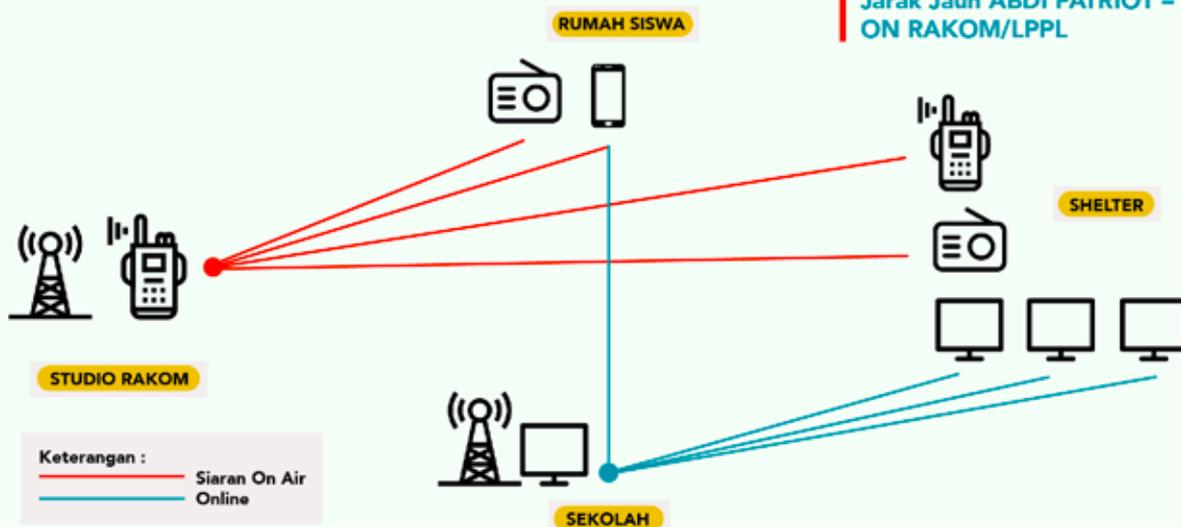
Sementara Komunitas PATRIOT dengan sigap menyiapkan aplikasi Belajar Daring tanpa kuota, termasuk dukungan SDM yang mendampingi dan melakukan *transfer knowledge* kepada Relawan TIK dan pegiat Jaringan

Radio Komunitas Lampung. Lalu Diskominfo Kabupaten Pringsewu, begitu mendengar rencana kami, dengan sigap menyiapkan slot program siaran di Radio Suara Pringsewu sebagai media pembelajaran jarak jauh.

Bahkan Bupati Kabupaten Pringsewu yang kebetulan hadir meninjau langsung turut memerintahkan Tim Bappeda untuk melakukan replikasi model ABDI 3 ON di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan. Apresiasi kami kepada Pemerintah Desa Margosari dan SDN 2 Margosari serta Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang juga dengan sigap turun tangan menyiapkan dukungan sesuai kapasitas masing-masing.

ABDI PATRIOT 3 ON adalah konsep pemanfaatan konvergensi media sebagai strategi solusi pembelajaran jarak jauh tanpa kuota. Perpaduan teknis pemanfaatan PJJ melalui Aplikasi Belajar Daring Intranet Patriot memanfaatkan *mini server & mini personal computer* rakitan sendiri menggunakan Arduino, Raspberry Pi/ Orange Pi, televisi sebagai layar monitor, Gawai pintar dan Acces Point / Wi-Fi Hotspot dan Radio Komunitas/LPPPL dan pemanfaatan HT dengan dukungan Radio Antar Penduduk Indonesia menghadirkan Konsep PJJ dengan 3 cakupan yakni Online, On Air dan On Land (3 On).

Konsep Skema Pembelajaran Jarak Jauh ABDI PATRIOT – 3 ON RAKOM/LPPL



Keunggulan strategi pembelajaran jarak jauh ABDI PATRIOT- 3 ON RAKOM di antaranya :

- 1 Mempertajam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dirumuskan sekolah dan guru
- 2 Menyediakan waktu belajar yang lebih luwes bagi siswa untuk menerima pelajaran yang diberikan sekolah
- 3 Konsep Online menyediakan media pembelajaran bagi sekolah dan siswa yang dapat diakses tanpa kuota internet dengan solusi:
 - Materi pembelajaran dapat disediakan dalam bentuk buku elektronik, soal elektronik dan video pembelajaran dan diletakan di dalam sebuah komputer server yang dapat diakses melalui komputer atau gawai pintar melalui WiFi jaringan intranet lokal
 - Dengan desain jangkauan jaringan intranet yang memadai, konten dan media belajar dapat diakses langsung di rumah secara mandiri maupun berkelompok (1-5 siswa) pada satu lokasi/*shelter* untuk mengatasi keterbatasan kepemilikan gawai/komputer.
- 4 Konsep On Air menjembatani media bagi guru dalam penjelasan materi belajar dalam bentuk ceramah, yang dilakukan dengan siaran di studio radio komunitas. Dalam jarak jangkauan tertentu, siswa dapat berinteraksi untuk bertanya melalui telepon, sms atau menggunakan pesawat radio HT.
- 5 Konsep On land, digunakan guru/sekolah untuk memproduksi konten materi pembelajaran dalam bentuk video dan bank soal/penugasan. Jika beberapa sekolah bergabung, sekolah-sekolah dapat membuat materi pembelajaran bersama. Begitu pula untuk siswa, kegiatan *on land* digunakan untuk mengerjakan penugasan dalam bentuk resume, pengerjaan soal atau proyek-proyek kecil, baik secara mandiri maupun kelompok terbatas.

Suasana terdesak memang mampu membuat kita menjadi lebih kreatif, dan kreativitas itu akan menjelma menjadi hasil/karya yang bermanfaat bagi banyak orang seandainya bisa dipertemukan dengan sumber daya dan kelompok pendukung yang mampu dan mau berbagi visi yang sama.

Memang benar bahwa masa krisis memunculkan *emphatic society* yang sebenarnya adalah kekuatan besar bangsa Indonesia. Jika bisa dimanfaatkan dengan cerdas maka semangat berbagi dan gotong-royong ini mampu menjadi jalan keluar kita sebagai bangsa untuk selamat dari dampak buruk pandemi COVID-19.

Kabar baik pun muncul di akhir September 2020 di mana Pemerintah Desa Bulakan Kabupaten Pematang juga menginisiasi program serupa. Hal kecil jika dimulai dari kebutuhan dan dieksekusi dengan semangat gotong-royong memang bisa menular, karena *gotong-royong adalah koentji*.







10 September 2020 merupakan hari yang membahagiakan bagi segenap Sivitas Kementerian Kominfo. Pasalnya, pada hari tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate genap berusia 61 tahun. Para staf menyiapkan perayaan bagi menteri yang akrab disapa Bang Johnny ini. Perayaan tersebut dilaksanakan di Rumah Dinas Menkominfo di kawasan Widyachandra, Jakarta Selatan secara sederhana, ditengah kondisi Kantor Kementerian Kominfo yang memang sedang pada situasi lockdown pada saat itu.

Doa dari para Sivitas Kementerian Kominfo semoga Pak Menteri senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk memberikan informasi yang transparan, aktual, dan terpercaya serta mewujudkan transformasi digital untuk #IndonesiaMaju.







Menjawab Tantangan di Tengah Pandemi Menuju Transformasi Digital



**Menteri Komunikasi dan Informatika
Johnny G. Plate**

Dalam Peringatan Hari Bhakti Posel ke-75
Jakarta, 28 September 2020



Patut untuk kita mengenang kembali bahwa pada tanggal 27 September 1945, Bapak Soetoko dan para pahlawan yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos, Telegrap, dan Telepon (AMPTT) merebut jawatan PTT dari tangan tentara Jepang sebagaimana yang sudah tertulis dengan baik dalam riwayat sejarah PTT Indonesia. Sejak saat itu, 27 September kita peringati sebagai Hari Bhakti Posel sebagai salah satu tonggak kemerdekaan bangsa, sekaligus merupakan titik awal dalam perkembangan pos serta telekomunikasi Indonesia.

Memperingati perjuangan sekaligus jasa Soetoko dan kawan-kawan terhadap kemajuan bidang pos dan telekomunikasi Indonesia, hari ini kita merayakan Hari Bhakti Posel ke-75 yang bertema “Transformasi Digital untuk Indonesia Maju” dengan meriah secara maknawi dan tetap mengutamakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Saya berterima kasih kepada penyelenggara dan kepada kita sekalian yang hari ini disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Dalam semangat untuk mengapresiasi dan terus mendorong putra-putri bangsa, untuk terus berinovasi dan mewujudkan Indonesia Maju, Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan.

Penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan

Kedua penghargaan tersebut merupakan tanda jasa yang diberikan pada warga negara Indonesia atas jasa, bakti, dan kontribusi aktifnya untuk Indonesia. Tahun ini, Bapak Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan kepada 24



putra-putri bangsa yang telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap sektor pos dan telekomunikasi Indonesia.

Melalui kesempatan ini, perkenankan saya turut menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada mereka. Saya ucapkan selamat kepada 18 penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya, yang telah memberikan darma baktinya yang besar kepada nusa dan bangsa, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Sebagai penghargaan tinggi, izinkan saya untuk sekali membacakan nama-nama dimaksud; (1). Dr. Dwi Handoko, M.Eng, (2). Ir. Hedi M. Idris, M.Sc, (3). Sabirin Mochtar,

S.E., M.M, (4). Setyanto Hantoro, S.T., M.M, (5). Sendy Aditya Kamesvara, S.T., M.M, (6). Ir. Aris Dwi Tjahjanto, M.M, (7). Ir. Riri Amalas Yulita, M.M, (8). Ir. Andi Agus Akbar, M.B.T, (9). Indra Mardiatna, S.T., M.M, (10). Elly Noor Qomariyah, S.H., M.H, (11). Chandra Hawan Aden, S.E., M.M, (12). Jamalul Izza, S.T, (13). Hartanto Nurtyasworo, S.H, (14). Andi F. Noya, (15). Desi Fitriani, S.Sos, (16). Agung Suprio, S.I.P., M.I.P, (17). Dedy Permadi, S.I.P., M.A., Ph.D, serta (18). Darmoni Badri.

Saya juga ucapkan selamat kepada 6 penerima penghargaan Satyalancana Pembangunan, yang telah memberikan jasa besar terhadap negara dan masyarakat dalam area pembangunan negara, yaitu (1). Otong lip, S.E., M.M, (2). Ir. Harry Mozarta Zen, M.B.A, (3). Mohammad Salsabil, S.T, (4). Ir. Mangasa Amperandus Simanjuntak, M.T, (5). Ir. Zulhelfi Abidin, M.Sc, CISA; dan (6). Kurniawan Hasmin Marunta, S.T.

Apresiasi dan Kontekstualisasi dengan Transformasi Digital

Perjuangan kita semua dalam membangun negara belum selesai. Kita masih harus terus berinovasi dan berkarya untuk menyiapkan Indonesia yang siap akan Revolusi Industri 4.0. Terlebih lagi, dalam masa pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat membutuhkan atau berbasis pada telekomunikasi dan infrastruktur yang mumpuni.

Sektor pos dan telekomunikasi memiliki peranan yang penting untuk menjadi solusi menjembatani penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Menyadari kebutuhan tersebut, Pemerintah pun hadir dengan agenda besar percepatan transformasi digital nasional yang harus diimplementasikan sesegera mungkin.

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, lima fokus utama dalam agenda percepatan transformasi digital nasional adalah Pertama, percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital. Kedua, pembuatan peta jalan transformasi digital di sektor strategis. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, Penyiapan sumber daya manusia atau talenta digital, serta Kelima, percepatan penyiapan hal-hal yang terkait regulasi atau payung hukum, skema pendanaan, dan pembiayaan.

Sejalan dengan arahan tersebut, sekaligus dalam upaya meningkatkan rasio internetifikasi atau keterjangkauan



internet di Indonesia dan menurunkan disparitas internetifikasi antar wilayah, Kementerian Kominfo secara serius terus mengupayakan percepatan transformasi digital Indonesia melalui empat pendekatan, yaitu:

1. Penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas.
2. Pengembangan dan adopsi teknologi baru untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan aman.
3. Pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan, serta
4. Penuntasan legislasi primer bidang telekomunikasi, informatika, dan perlindungan data pribadi yang diikuti penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara.

Saat ini masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di wilayah 3T berharap dan mendambakan deployment internet dan tersedianya WIFI dengan kecepatan yang memadai untuk menghantar mereka secara bersama-sama bergerak menuju transformasi digital. Selain itu, proses politik dalam rangka menyelesaikan payung-payung hukum yang penting sedang berlangsung. Kami berharap proses politik antar pemerintah dan DPR RI dapat bisa segera diselesaikan, sehingga ruang-ruang kosong yang melindungi hak dan kewajiban serta tugas dan tanggungjawab seluruh ekosistem bernegara kita bisa mendapat kepastian dan kekuatan hukum yang memadai.

Oleh karena itu berbagai kebijakan dan agenda nasional tersebut tentu membutuhkan peran dan dukungan yang luar biasa dari seluruh pihak. Dengan demikian, inovasi, kreasi, dan kontribusi kita bersama menjadi kunci dalam pelaksanaan akselerasi transformasi digital Indonesia. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pihak pun berperan signifikan dalam upaya perwujudannya.

Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan apresiasi tertinggi sekaligus rasa terima kasih yang mandalam kepada seluruh jajaran yang bergiat di sektor pos dan telekomunikasi, baik yang berada dalam lingkungan pemerintahan maupun non-pemerintahan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus percaya, peduli, dan senantiasa mendorong sektor pos dan telekomunikasi Indonesia untuk terus maju dan berkembang.

Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan Selamat Hari Bhakti Posel ke-75 kepada seluruh insan pos dan telekomunikasi di seluruh penjuru Tanah Air. Semoga sektor posel tetap jaya dan terus berkembang untuk mewujudkan akselerasi transformasi digital demi Indonesia Maju!





Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Jajaran Eselon I Kementerian Kominfo hadir dalam Upacara Peringatan HUT Ke 75 Postel. Tampak mendampingi Menteri Kominfo (ki-ka) : Dirut BAKTI Anang Latif, Dirjen PPI Ahmad M. Ramli, Irjen Kominfo Doddy Setiadi, Dirjen SDPPI Ismail dan Dirjen IKP Widodo Muktiyo.



Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, kepada Host (Presenter) Metro TV Andi F. Noya





Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, kepada Staf Khusus Menteri Bidang Digital dan SDM Kem Kominfo Dedy Permadi SIP, MA, PhD



Foto bersama dengan Para Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya



Hari Bhakti Postel ke-75; Membangun Spirit Transformasi Digital

Hari Bhakti Postel yang diperingati pada 27 September setiap tahunnya dilatari sejarah perjuangan pahlawan khususnya pahlawan Angkatan Muda Pos, Telegrap dan Telepon (AMPTT) yang berhasil merebut jawatan PTT dari tentara Jepang. Sejarah tersebut menginspirasi ekosistem pos dan telekomunikasi (postel) untuk menterjemahkan sejarah kepahlawanan Angkatan Muda Pos, Telegrap dan Telepon (AMPTT) dalam konteks kekinian.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, dalam wawancara khusus dengan tim KominfoNext di Jakarta, Senin (28/09/2020). "Yang paling jelas adalah kita dari bidang Kominfo termasuk juga khususnya Ditjen SDPPI harus bisa menterjemahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital. Jadi artinya, spirit dari kepahlawanan AMPTT itu diterjemahkan tetap bekerja keras, menuntaskan dan mempercepat proses transformasi digital," jelasnya," tutur Dirjen Ismail. Ia menjelaskan, salah satu agenda utama dalam transformasi digital adalah infrastruktur. "Agenda utama dalam transformasi digital adalah infrastruktur, dengan target agar konektivitas digital khususnya akses terhadap internet bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, konektivitas digital di Indonesia sangat bertumbuh pada *mobile broadband* dan melalui perangkat seluler," jelas Dirjen Ismail.

Sumber Foto : Antara Foto



Oleh karena itu, Ditjen SDPPI Kominfo memastikan akan tetap mengawal agar spektrum frekuensi radio tersedia cukup dan juga bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh operator, agar dapat menghasilkan kualitas jaringan seluler yang terbaik, tidak hanya di kota-kota besar tapi juga menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.

Agen Perubahan Teknologi Digital

Melalui momentum Hari Bhakti Postel ke-75 ini, Komunitas Postel diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk masyarakat dalam percepatan transformasi digital dari banyak aspek. Salah satunya adalah infrastruktur berikut aspek pemanfaatannya.

“Komunitas Postel harus bisa menjadi *agent of development* dan agen perubahan kepada masyarakat untuk bisa mengadopsi teknologi digital di

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh untuk meningkatkan produktivitas UMKM, sehingga UMKM di Indonesia bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan bisnis dan melakukan aktivitas ekonomi di dunia digital,” jelas Dirjen Ismail.

Komunitas Postel juga perlu membantu adopsi pemanfaatan teknologi digital kepada pelajar dan mahasiswa agar bisa melakukan proses belajar mengajar jarak jauh, di tengah pandemi COVID-19 yang menuntut pelajar dan mahasiswa untuk tetap membangun karakter dan kompetensi melalui dunia digital.

Lingkungan pemerintahan, lanjut Dirjen Ismail, juga menjadi aspek penting dalam percepatan transformasi digital. Pelayanan publik yang lebih baik, transparan, cepat dan akuntabel kepada masyarakat juga dilihat dari adopsi teknologi digital yang berkualitas baik pelayanan publik di pemerintah pusat maupun daerah.

“Penting bagi Komunitas Postel untuk hadir di hampir semua sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, pendidikan bahkan sampai rumah tangga. Komunitas Postel harus bisa menjadi *agent of development* untuk penggunaan atau mengadopsi teknologi digital ini dalam kehidupan sehari-hari,” kata Dirjen Ismail.

Sumber Foto : Unsplash



Implementasi Teknologi 5G

Dalam wawancara tersebut, Dirjen SDPPI turut menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan ekosistem implementasi jaringan 5G di Indonesia. Menurutnya salah satu prasyarat implementasi 5G adalah fiberisasi. Oleh karena itu, operator telekomunikasi harus membangun jaringan fiber optik yang menghubungkan antar *Base Transceiver Station (BTS)*. “Karena 5G merupakan *last mile*. Jadi digunakan di ujung akhir dari BTS ke publik,” jelasnya.

Menurut Dirjen SDPPI, dari jumlah BTS yang sudah ada jangan sampai terjadi *bottlenecking* atau penyempitan saluran karena informasi yang disalurkan besar di ujung atau *last mile* dengan 5G tapi kemudian ke belakangnya terjadi pelambatan. “Ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh seluruh operator menggunakan fiberisasi untuk membangun fiber optik yang menghubungkan antar BTS. Tanpa

fiberisasi, jaringan 5G juga tetap tidak dirasakan manfaatnya, hampir sama dengan 4G ketika terjadi *bottlenecking*.”

Syarat kedua implemetasi 5G adalah aplikasi yang harus dibangun oleh operator seluler dan industri secara keseluruhan, yang diutamakan membangun aplikasi lokal. Jangan sampai nanti kita membangun *network* 5G tapi isinya adalah aplikasi asing. Sehingga tidak ada aplikasi lokal yang mengeluarkan karya anak bangsa karena pendapatan atau rupiah adanya di level aplikasi.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berharap Komunitas Postel mulai mempersiapkan beragam aplikasi lokal agar ketika *network* 5G dibangun dapat memanfaatkan produk dalam negeri karya anak bangsa.

Terakhir, dengan *digital talent* atau sumber daya manusia (SDM) yang menjadi syarat ketiga bagi Indonesia untuk siap mengimplementasikan teknologi 5G. “Jangan sampai teknologi 5G diimplementasikan tapi kita tidak mampu memelihara, tidak ada orang yang cukup untuk melakukan *enhancement* (peningkatan) dari kemampuan 5G itu, baik dari sisi operator juga dari sisi *user*.”

Mengingat pentingnya talenta digital yang harus dipersiapkan sebelum *roll up* teknologi 5G benar-benar dibangun. Kementerian Kominfo menjawab kebutuhan tersebut melalui program pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) dimulai dari pelatihan dasar (*basic*), *intermediate* hingga *advance*.

Pesan untuk Insan Kominfo

Menutup perbincangan dengan tim KominfoNext sore itu, Dirjen Ismail menyampaikan pesan khusus kepada insan Kominfo di seluruh Indonesia. “Saya berpesan kepada seluruh insan Kominfo untuk tetap menjaga semangat dan spirit yang ada di dalam Hari Bhakti Postel. Karena perjuangan insan Kominfo adalah *never ending* dan tidak pernah kenal lelah.”

Dirjen SDPPI Kominfo juga menekankan pentingnya mengembangkan inovasi dan menjaga spirit sebagai insan Kominfo untuk diimplementasikan ke dalam dunia nyata dan yang kekinian.

“Hari Bhakti Postel harus dijadikan momentum untuk terus bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja sama. Semoga teman-teman insan Kominfo di seluruh Indonesia bisa menerjemahkan itu dalam keseharian spirit dari Hari Bhakti Postel ini,” ujarnya.





KOMINFOMATE

There is **hoax** among us



HOAX Reported



Jika menemukan **hoax** segera adukan ke
aduankonten.id



Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan PNPB Lainnya	21.797.244.300.130,00	22.539.854.164.763,00
JUMLAH PENDAPATAN	21.797.244.300.130,00	22.539.854.164.763,00
BEBAN		
Beban Pegawai	509.565.777.235,00	421.821.177.227,00
Beban Persediaan	27.300.633.000,00	29.207.321.410,00
Beban Barang dan Jasa	4.902.418.352.661,00	3.595.572.162.029,00
Beban Pemeliharaan	104.440.112.229,00	105.401.856.521,00
Beban Perjalanan Dinas	618.580.552.213,00	594.348.090.623,00
Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat	59.783.797.857,00	4.905.187.800,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	256.465.694.429,00	277.825.591.721,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(453.361.359.486,00)	235.209.466.770,00
JUMLAH BEBAN	6.025.193.560.138,00	5.264.290.854.101,00
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	15.772.050.739.992,00	17.275.563.310.662,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(12.586.597.807,00)	(1.092.386.231,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.387.657.040,00	6.600.067.068,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(211.458.446,00)	(7.451.672.119,00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(8.410.399.213,00)	(1.943.991.282,00)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	15.763.640.340.779,00	17.273.619.319.380,00
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	15.763.640.340.779,00	17.273.619.319.380,00

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER
2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	5.463.907.620.634,00	4.467.410.250.110,00
Surplus/Defisit	15.763.640.340.779,00	17.273.619.319.380,00
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	6.952.406.012.661,00	(3.937.115.553,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	(3.322.399.554,00)	-
Selisih Revaluasi Aset	4.779.262.195.224,00	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	29.626.392.506,00	(34.320.229.068,00)
Koreksi Lain-lain	2.148.839.824.485,00	30.383.113.515,00
Transaksi Antar Entitas	(16.986.065.382.040,00)	(16.273.184.833.303,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	5.729.980.971.400,00	996.497.370.524,00
Ekuitas Akhir	11.193.888.592.034,00	5.463.907.620.634,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 (Audited) telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian"

Informasi lebih rinci dari Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 (Audited) dapat dilihat pada link <http://eppid.kominfo.go.id>



NERACA

PER 31 DESEMBER
2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2019	31 Desember 2018	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	15.355.366.199.850,00	13.571.488.298.366,00	1.783.877.901.484,00	13,14%
Aset Tetap	6.840.612.491.727,00	2.308.352.764.377,00	4.532.259.727.350,00	196,34%
Aset Lainnya	87.276.487.191,00	87.722.451.181,00	(445.963.990,00)	(,51%)
Jumlah Aset	22.283.255.178.768,00	15.967.563.513.924,00	6.315.691.664.844,00	39,55%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	11.089.366.586.734,00	10.503.655.893.290,00	585.710.693.444,00	5,58%
Jumlah Kewajiban	11.089.366.586.734,00	10.503.655.893.290,00	585.710.693.444,00	5,58%
Ekuitas				
Ekuitas	11.193.888.592.034,00	5.463.907.620.634,00	5.729.980.971.400,00	104,87%
Jumlah Ekuitas	11.193.888.592.034,00	5.463.907.620.634,00	5.729.980.971.400,00	104,87%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	22.283.255.178.768,00	15.967.563.513.924,00	6.315.691.664.844,00	39,55%

LAPORAN
REALISASI
ANGGARANUNTUK PERIODE YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER
2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		% thd Angg	Realisasi 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi		
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	19.176.636.244.000,00	22.808.026.036.402,00	118,94	21.394.156.960.364,00
JUMLAH PENDAPATAN	19.176.636.244.000,00	22.808.026.036.402,00	118,94	21.394.156.960.364,00
BELANJA				
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	421.703.614.000,00	402.768.963.633,00	95,51	400.706.908.212,00
Belanja Barang	6.057.439.016.000,00	5.918.040.200.898,00	97,70	4.285.388.630.083,00
Belanja Modal	192.256.070.000,00	178.076.805.783,00	92,62	230.327.472.716,00
JUMLAH BELANJA	6.671.398.700.000,00	6.498.885.970.314,00	97,41	4.896.423.011.011,00

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2020

Menteri Komunikasi dan Informatika



Johnny Gerard Plate



Penanganan Pada 10 Provinsi Prioritas Cenderung Membaik

Sumber: <https://covid19.go.id/p/berita/penanganan-covid-19-pada-10-provinsi-prioritas-cenderung-membaik>

JAKARTA - Perkembangan penanganan pada 10 provinsi prioritas menunjukkan kondisi yang positif. Persentase angka kesembuhan terlihat meningkat, penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 menurun serta kasus kematian juga cenderung menurun.

Satgas Penanganan COVID-19 menguraikan kontribusi kasus secara nasional pada 10 provinsi prioritas berdasarkan hasil evaluasi periode 13 - 27 September 2020. Kesepuluh itu di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua, Bali dan Banten.

Per 13 September persentase kasus aktif dari 10 provinsi prioritas menyumbang 71,86% dari kasus nasional. Kemudian pada 20 September persentase menurun menjadi 70,41%, dan pada 27 September turun menjadi 67,62%.

"Ini adalah kabar baik dan perlu ditekan sehingga kasus aktif di 10 provinsi prioritas dapat terus menurun," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor

Presiden yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/10/2020).

Dilihat dari tingkat kesembuhan, terjadi peningkatan baik tingkat nasional maupun 10 provinsi prioritas. Namun Wiko mengakui, kontribusi kesembuhan 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan.

Per 13 September persentase kesembuhan 80,15%, lalu per 20 September menurun menjadi 79,65% dan 27 September menurun lagi menjadi 79,35%. "Kalau kita meningkatkan kesembuhan pada 10 provinsi prioritas ini, maka angka nasional juga akan meningkat secara signifikan," ujar Wiku.

Sedangkan pada kasus kematian terjadi peningkatan pada tingkat nasional maupun 10 provinsi prioritas ini. Persentasenya cenderung meningkat, dengan kontribusi terhadap nasional per 13 September sebesar 77,67%, naik pada 20 September menjadi 80,47%, dan cenderung turun per 27 September menjadi 80,18%.

Ia pun merincikan perkembangan kasus pada 10 provinsi prioritas berbeda-beda. Secara umum persentase kasus aktif menurun, kecuali Sulawesi Selatan dan Papua. Sulawesi Selatan sempat mengalami peningkatan persentase kasus aktif pada 20 September sebesar 23,90% dari 20,77% per 13 September. Dan pada 27 September 23,23%.

Sedangkan di Provinsi Papua, kasus aktif meningkat cukup signifikan, yaitu per 13 September berada di 22,72%, naik menjadi 29,5% pada 20 September dan terus naik menjadi 35,7% pada 27 September. "Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk terus menekan penularan sehingga dapat menurunkan kasus aktifnya," lanjut Wiku.



"Kami mohon seluruh provinsi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan penanganan kasus terutama pada gejala sedang dan berat, sehingga angka kematian dapat ditekan hingga tidak ada penambahan sama sekali."

Tingkat kesembuhan pun cenderung meningkat di seluruh provinsi prioritas kecuali di kedua provinsi tersebut. Sulawesi Selatan menurun dari 76,37% per 13 September, menjadi 74,06% pada 27 September. Sementara Papua menurun dari 76,01% per 13 September menjadi 62,8% pada 27 September.

Lalu untuk kasus kematian cenderung stagnan, bahkan untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan mengalami penurunan.

"Kami mohon 10 provinsi ini, dan tentunya seluruh provinsi di Indonesia untuk terus menekan angka kematian dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan penanganan kasus terutama pada gejala sedang dan berat, sehingga angka kematian dapat ditekan menjadi tidak ada penambahan sama sekali," lanjut Wiku.

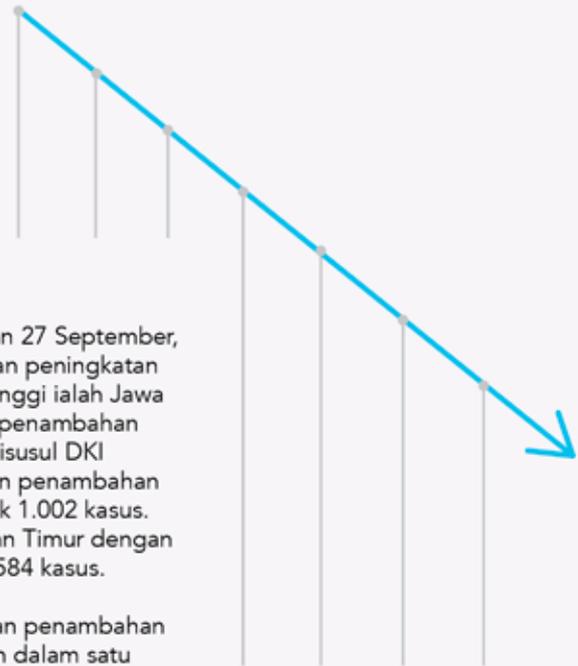
Selain itu melihat data perkembangan secara nasional dalam sepekan terakhir, terdapat 20 provinsi dengan jumlah kasus yang meningkat dibanding minggu sebelumnya, dan 14 provinsi dengan kasus menurun dibandingkan minggu sebelumnya.

Sampai dengan 27 September, provinsi dengan peningkatan kasus paling tinggi ialah Jawa Barat dengan penambahan 1.726 kasus, disusul DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 1.002 kasus. Lalu Kalimantan Timur dengan penambahan 584 kasus.

Provinsi dengan penambahan kasus terendah dalam satu minggu terakhir ialah Nusa Tenggara Barat dengan 2 kasus, Sulawesi Tengah 6 kasus dan Kalimantan Selatan 9 kasus. "Kami mohon agar dapat ditekan sedikit lagi agar minggu depan tidak terjadi penambahan kasus sama sekali," ujarnya.

Apresiasi diberikan pada 14 provinsi dengan penurunan kasus dalam seminggu terakhir. Penurunan kasus paling tinggi terjadi di Jawa Timur dengan 445 kasus, disusul Sumatera Utara dengan 233 kasus, dan Aceh 205 kasus.

Sementara perkembangan harian per 1 Oktober 2020 terjadi penambahan kasus positif 4.174 kasus dan kumulatifnya 291.182 kasus. Kasus aktif per 1 Oktober sebesar 61.839 kasus, atau 21,2%, dibandingkan rata-rata dunia 22,5%.



Lalu untuk jumlah kasus sembuh ada penambahan 3.540 kasus, dengan kumulatif sebesar 218.487 kasus atau 75%. Rata-rata kesembuhan dunia di angka 74,44%. "Jadi persentase kesembuhan di Indonesia sedikit lebih tinggi dari angka dunia," ujar Wiku.

Pada kasus kematian hingga saat ini sudah mencapai 10.856 kasus atau 3,7%. Dibandingkan persentase rata-rata kematian di dunia sebesar 2,98%. "Kasus meninggal persentasenya di Indonesia makin lama makin turun tetapi sementara waktu masih diatas rata-rata angka dunia," ungkapnya.

Per 1 Oktober, jumlah suspek tercatat ada 135.480 kasus dan 43.592 spesimen. Sebaran wilayah masih terjadi di 34 provinsi dan 497 kabupaten/kota.



Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengikuti Peresmian Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020 yang berlangsung virtual dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/09/2020). - (AYH)

Cerdaskan Bangsa, Kominfo Bangun Akses dan Dukung Program Kuota Data Internet

Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh pelaksanaan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020. Kebijakan itu merupakan asistensi fiskal APBN yang diberikan untuk menopang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, pendidik dan dosen di Indonesia. Kementerian Kominfo membangun akses internet cepat dan mengajak mitra operator seluler meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan untuk mencerdaskan bangsa.

"Tentu, keberhasilan ini tidak terlepas dari keberpihakan Bapak Presiden untuk memastikan para siswa kita, pendidik dan para dosen bisa mengatasi *problem* yang paling besar saat ini yaitu ketersediaan pembiayaan untuk akses internet dalam rangka menunjang proses belajar dan mengajar," tutur Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Peresmian

Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020 yang berlangsung virtual dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/09/2020).

Menteri Kominfo menilai kebijakan asistensi fiskal akan sangat bermanfaat bagi lebih dari 60 juta siswa pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pendidikan khusus lembaga keagamaan di bawah Kementerian Agama seperti pesantren.

Bahkan menurutnya, Mendikbud Nadiem Makarim tengah menyiapkan dan mengatur alokasi penggunaan dan pemanfaatan secara *staging up* di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dan dosen, "Ini dibagi dalam dua kategori yaitu 5GB untuk kuota umum dan sisanya masing-masing untuk kuota belajar. Saya kira ini keputusan yang baik sekali dan tepat," tegasnya.

PORTAL
Kominfo.go.id
SIARAN PERS

Dukungan Kominfo

Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny berupaya memastikan semua operator seluler menjaga kualitas jaringan dengan baik. "Oleh karenanya, setiap operator seluler yang mengambil bagian dalam program tersebut memperhatikan betul ketersediaan infrastrukturnya di tempat masing-masing. Karena ini akan berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar dan *quality of service*-nya," jelasnya.

Menurut Menteri Kominfo, lembaga yang dipimpinnya juga akan memperhatikan kecepatan serta perluasan jaringan akses internet. Hal itu dilakukan dengan membangun Base Transceiver Station (BTS) di *last mile* yang membutuhkan pekerjaan sangat kompleks karena tantangan wilayah. Selain itu, juga menyediakan akses internet Super Wifi.

"Saat ini Kementerian Kominfo juga menggunakan akses internet yang langsung ke satelit, baik berupa akses internet yang biasa dilakukan untuk radius terbatas sekitar 50 sampai 100 meter. Dan kali ini untuk pertama kalinya kita melakukan uji coba dan *pilot project* yang disebut dengan Super Wifi," jelasnya. Super Wifi memiliki jangkauan akses internet dalam radius 500 meter dengan kapasitas kecepatan antara 4 s.d. 30 GBps. Dengan jangkauan itu,

Menteri Johnny menilai cukup untuk mendukung proses belajar mengajar, "Kami juga akan memperhatikan penataan dan penambahan spektrum frekuensi radio melalui *farming* dan *refarming* agar proses belajar mengajar ini bisa dilakukan dengan baik," ujarnya. Menteri Kominfo juga sudah menyiapkan *roadmap* untuk

deployment 4G network di 12.548 desa dan kelurahan yang saat ini belum ada sinyal 4G paling lambat selesai di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk menyediakan akses di seluruh titik layanan publik baik di pemerintahan desa, puskesmas maupun sekolah agar bisa menggunakan jaringan internet 4G.

"Untuk tahun 2021 Pemerintah sudah memberikan komitmen melalui intervensi fiskal. Kemarin saya baru saja selesai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I untuk disetujui pembangunan tahap pertama sebanyak 4.200 titik di 4.200 desa di Indonesia untuk 4G," jelasnya seraya menambahkan kini Kementerian Kominfo tengah menyiapkan mekanisme kerja sama dengan operator seluler untuk menyediakan akses yang diperlukan.



Libatkan Operator Seluler

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyampaikan terima kasih kepada operator seluler Telkomsel, Indosat Ooredoo, Tri, XL Axiata, Smartfren yang telah memberikan dukungan dan peran aktif memastikan terselenggaranya kebijakan Bantuan Kuota Data Internet tahun 2020.

"Kita perlu sama-sama tahu, saya diinformasikan bahwa Rp.1000 GB adalah harga yang betul-betul sangat kompetitif yang diberikan oleh operator seluler. Sepengetahuan saya itu diskonnya sekitar 2/3. Dan atas kerja sama operator seluler untuk memberikan dukungan proses belajar mengajar PJJ ini, saya tentu berterima kasih dan mudah-mudahan keputusan baik ini akan diberikan imbalan melalui usaha-usaha yang lebih maju dan lebih hebat," ungkapnya.

Di tengah pandemi COVID-19 sektor informasi dan komunikasi merupakan salah satu dari dua sektor di Indonesia pada kuartal kedua bertumbuh positif. Bahkan menurut Menteri Kominfo, sektor informasi dan komunikasi bertumbuh *double digit* 10,88 persen dibanding sektor lainnya yang mengalami kontraksi yang dalam.

"Saya berharap penggelaran jaringan *fixed broadband* dan *mobile broadband* bisa benar-benar selesai. Sebab, penggelaran tersebut merupakan salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo dalam rangka menerjemahkan akselerasi transformasi digital, yaitu menyelesaikan *deployment ICT infrastructure* di seluruh Indonesia," paparnya.

Menteri Johnny juga menyampaikan penghargaan atas komitmen tinggi operator seluler dalam membangun

infrastruktur telekomunikasi di 3.435 desa dan kelurahan wilayah komersial yang menjadi wilayah kerja operator seluler.

"Semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan keputusan investasi agar bersama-sama nanti bisa menyelesaikan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 sudah terlayani dengan sinyal 4G. Dengan kerendahan hati saya berharap mulai secara bertahap kita *take out 3G infrastructure* dan *upgrade* menjadi 4G. Dengan kerja keras dan kerja besar di bawah *leadership* Bapak Presiden dalam dua tahun ke depan adalah masa yang kritis, tetapi memberikan ruang, harapan dan peluang," tandasnya optimistis.

Dengan penyelesaian *deployment* infrastruktur TIK, menurut Menteri Kominfo, Indonesia secara teknis menjadi negara digital atau Indonesia Digital Nations. "Namun upaya dan niat baik tersebut memerlukan kerja besar. Kerja besar ini adalah investasi sumber daya manusia, investasi masa depan Indonesia. Indonesia akan sangat kompetitif dengan keputusan yang kita ambil sekarang karena memang keputusan ini tepat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia," ujarnya.

Acara peluncuran yang berlangsung secara virtual dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Hadir dalam peluncuran kebijakan anara lain Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro; Direktur Utama Indosat Ooredoo Ahmad Abdulaziz Al-Neama; Direktur Utama XL Axiata Dian Siswarini; Direktur Utama Hutchison 3 Cliff Woo; Direktur Utama Smartfren Merza Fachys; dan pejabat di Kementerian Kominfo, Kemdikbud, dan Kementerian BUMN.



PORTAL
Kominfo.go.id
SIARAN PERS



Pemerintah RI Nyatakan Komitmen Tangani *Infodemic*

Pemerintah Republik Indonesia menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani *infodemic*. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah memfokuskan perhatian pada maraknya disinformasi dan misinformasi yang memengaruhi penanganan COVID-19 dari sisi medis.

"Yang mendasari perjuangan Indonesia adalah semangat kolaborasi. Pekerjaan ini diimplementasikan dengan pendekatan *pentahelix* atau "lima spiral kerja sama" yang melibatkan pemerintah, sektor privat atau bisnis, akademisi, media, dan yang terpenting, masyarakat dan komunitas," paparnya dalam Pertemuan *United Nations General Assembly High-Level Side Event on Infodemic Management* yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Rabu (23/09/2020).

Menurut Menteri Johnny penanganan pandemi COVID-19 bukan hanya masalah medis belaka. "Masalah yang lebih besar terletak pada masalah persepsi dan kepercayaan publik terhadap informasi karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dan tidak sedikit dari informasi tersebut yang menyesatkan. Ini yang disebut sebagai *infodemic*," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menekankan pentingnya peningkatan literasi dan adopsi teknologi digital dalam upaya memberantas *infodemic*. Upaya itu menjadi bagian tak terpisahkan dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif itu harus dilakukan melalui pendekatan lintas pemangku kepentingan atau *multistakeholders*.

"Berkaca pada pengalaman kami dalam memberantas informasi palsu, Indonesia hanya fokus pada peningkatan literasi digital bangsa melalui berbagai kegiatan literasi digital. Solusi teknologi seperti media sosial, saluran informasi dan berita, chatbot, dan aplikasi berbasis *mobile* PeduliLindungi juga telah dikembangkan dan disebar untuk mendukung upaya penanggulangan *infodemic*," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Johnny mengajak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta badan terkait lainnya untuk bersama-sama menanggulangi penyalahgunaan informasi secara global.

"Saya berharap pengalaman Indonesia akan memicu upaya serupa di negara lain dan mengembangkan kolaborasi yang bermanfaat antar bangsa. *Infodemic* adalah masalah bersama yang membutuhkan solusi kolektif di antara kita. Mari kita bekerja sama

untuk mengatasi pandemi ini dengan selamat dan sehat," ucapnya.

Menteri Johnny mengapresiasi upaya luar biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan di bawahnya, termasuk World Health Organization (WHO), dalam membantu negara di seluruh dunia untuk menavigasi keluar dari pandemi COVID-19.

"Atas nama masyarakat Indonesia, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya WHO atas upaya luar biasa, tidak hanya dalam menyelenggarakan program ini, tetapi juga kerja keras mereka dalam membantu negara-negara di seluruh dunia untuk menavigasi keluar dari pandemi," ungkapnya.

Tiga Strategi Pendekatan

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel A. Pangerapan yang ditunjuk sebagai perwakilan

Indonesia dalam pertemuan tersebut, memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memerangi hoaks dan *infodemic* selama ini. "Sejauh ini, kita mengenal tiga jenis penyalahgunaan informasi, yaitu disinformasi, misinformasi, dan malinformasi," tutur Dirjen Samuel.

Dirjen Samuel memaparkan, terdapat tiga isu penyalahgunaan informasi COVID-19 yang sering muncul di Indonesia, yaitu: (1) pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat terkait situasi dan prosedur medis dalam penanganan COVID-19, (2) informasi yang kurang tepat terkait COVID-19, dan (3) penyalahgunaan informasi terkait *physical distancing* dan protokol kesehatan lainnya yang menyebabkan meningkatnya kasus dugaan penipuan pada sektor ekonomi.

COUNTERING THE INFODEMIC

As Indonesia has been experiencing large scale hoax incidents for years, we implement our method through a downstream approach in countering the spread of harmful information:

UPSTREAM

Digital literacy and capacity building



Objective: equipping people with necessary knowledge and digital literacy skills to know, differentiate, and take appropriate action on hoaxes.



Actions included: digital literacy trainings and educational roadshows.



Parties involved: the National Digital Literacy Movement Siberkreasi, public agencies, research communities, other

MIDDLE-STREAM

Direct actions to take-down harmful information through technology and collaboration with social media platform



Objective: minimizing the spread of fake news by taking direct action towards its sources in social media



Actions included: take-down of hoax information by collaborating with social media platforms, improving technological innovation (tracing app)



Parties involved: Social media platform providers

DOWN-STREAM

Direct actions to provide technical assistance on supervising the spread of harmful information



Objective: minimizing the effects from the spread of COVID-19 related harmful information.



Actions included: institutional collaboration, easing access of network connections for medical and educational purposes.



Parties involved: Law Enforcement Authorities, internet service & telecommunication network providers



3 Isu Penyalahgunaan Informasi COVID-19

1. Pemahaman yang kurang tepat dari masyarakat terkait situasi dan prosedur medis dalam penanganan COVID-19
2. Informasi yang kurang tepat terkait COVID-19
3. Penyalahgunaan informasi terkait *physical distancing* dan protokol kesehatan lainnya

DATA HOAKS

23 Januari 2020
hingga
23 September 2020

1.725 Hoaks

1.984 konten hoaks
berkaitan COVID-19
telah ditake-down

Dirjen Samuel menyatakan, selama kurun waktu 23 Januari 2020 hingga 23 September 2020, Kementerian Kominfo telah melakukan take-down 1.725 hoaks dari 1.984 konten hoaks yang berkaitan dengan COVID-19 di platform media sosial.

Dalam menangani hoaks dan *infodemic* secara berkelanjutan, menurut Dirjen Aptika Pemerintah Indonesia menekankan upaya edukasi dan peningkatan kapasitas, di samping upaya penanganan konten dan juga dukungan penegakan hukum.

"Dengan demikian, masyarakat dapat cakap dan terampil dalam mengidentifikasi penyalahgunaan informasi dan melakukan tindakan lanjutan jika informasi yang salah," tuturnya.

Dirjen Samuel kembali menyuarakan pendekatan Kementerian Kominfo yang mengedepankan pendekatan lintas pemangku kepentingan, atau *multistakeholder* yang terdiri dari lima spiral kerja sama atau *penta-helix* seperti yang dipaparkan Menteri Johnny sebelumnya.

"Sebagai contoh konkret, upaya peningkatan literasi digital ini dilakukan

melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang berkolaborasi dengan 108 komunitas, akademisi, dan institusi pemerintah untuk melaksanakan edukasi dan pelatihan terkait literasi digital," jelasnya.

Pertemuan *United Nations General Assembly High-Level Side Event on Infodemic Management* merupakan hasil kerjasama antara WHO, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan Thailand, dan *Uruguay Salud.uy Initiative at the Electronic Government and Information and Knowledge Society*, Uruguay.

Dalam 73th World Health Assembly yang diselenggarakan pada bulan Mei 2020, negara anggota WHO menyetujui Resolusi WHA73.1 yang mengakui pentingnya manajemen *infodemic* untuk menyediakan informasi yang benar mengenai COVID-19 dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi misinformasi dan disinformasi. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menjadi titik awal bergulirnya diskusi mengenai penanganan *infodemic* secara komprehensif dan kolaboratif antarnegara ke depannya.

Sesuai PM Kominfo No.1/2020 tentang **Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi** yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui **Identifikasi IMEI**, perangkat yang tidak memenuhi syarat atau **ilegal** akan **dibatasi** tersambung ke jaringan bergerak seluler.



Pemerintah Terapkan Pengendalian IMEI Perangkat Telekomunikasi Berbasis CEIR

Pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, mulai Selasa, 15 September 2020 Pukul 22.00 WIB.

Dalam rangka perlindungan konsumen, pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah

atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi. Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem *Central Equipment Identity Register* (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk

PORTAL
Kominfo.go.id
SIARAN PERS

mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI.

Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan Pelaksanaan Pengendalian IMEI Nasional akan beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00. Seluruh perangkat HKT yang IMEI nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.

Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan

perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di <http://imei.kemenperin.go.id> Selanjutnya melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar.

Untuk pembelian secara online, pastikan bahwa penjual menjamin IMEI perangkat sudah tervalidasi dan teregistrasi sehingga dapat digunakan. Pedagang offline maupun online bertanggungjawab terhadap HKT yang diperdagangkan.

Bagi masyarakat yang membeli HKT secara daring melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari *Free Trade Zone* melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib

mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui <https://www.beacukai.go.id/regist-imei.html> atau melalui Aplikasi *Mobile Beacukai* yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan sim card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 x 24 jam.

Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi customer service (layanan call center/email/digital) operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi serta hal lain diluar kewenangan operator telekomunikasi terkait dengan pengendalian IMEI dapat menghubungi Call Center Kominfo 159.

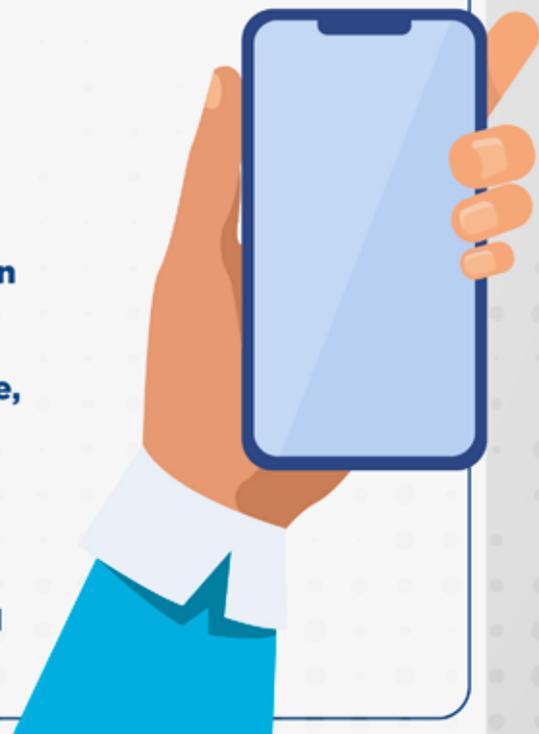
1. Pastikan IMEI tercantum pada kemasan

2. Cek Imei pada <http://imei.kemenperin.go.id>

3. Pastikan perangkat mendapatkan sinyal

4. Jika melakukan pembelian online, pastikan penjual menjamin IMEI tervalidasi.

5. Jika HKT melalui kiriman atau membawa dari luar negeri, penuhi wajib pajak dan mendaftarkan IMEI



SOROTAN MEDIA





Solusi Internet Daerah 3T, Kemenkominfo Uji Coba Super Wifi

<https://teknologi.bisnis.com/read/20200928/101/1297570/solusi-internet-daerah-3t-kemenkominfo-uji-coba-super-wifi>

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menguji teknologi Super Wifi untuk menyalurkan akses internet di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Teknologi ini menawarkan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan wifi biasa.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Latif mengatakan bahwa teknologi Super Wifi pada hakikatnya sama seperti teknologi wifi pada umumnya. Bedanya, Super Wifi dapat menjangkau hingga 500 meter atau lima hingga sepuluh kali lipat lebih luas dibandingkan dengan wifi biasa.

“Teknologi wifi ini terpisah dengan teknologi satelitnya, sepanjang kami bisa alokasikan satelit lebih banyak di titik Super Wifi, tentu kapasitasnya cukup besar,” kata Anang kepada Bisnis.com, Minggu (27/9/2020).

Anang menambahkan saat ini BAKTI masih menguji teknologi Super Wifi. Jika teknologi ini stabil, BAKTI bakal menggunakan teknologi ini secara masif.

BAKTI melakukan uji coba teknologi Super Wifi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Super Wifi terpasang di 23 titik dengan memanfaatkan akses internet dari satelit.

Dia mengungkapkan dari total 7.652 titik Internet cepat yang dibangun oleh BLU BAKTI, 852 titik berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara, 538 titik diantaranya dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kantor pemerintahan, pelayanan kesehatan, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Super Wifi menawarkan kecepatan berkisar 8 Mbps – 30 Mbps tergantung dengan lokasi dan kapasitas satelit.

Anang menyampaikan manfaat dari Super Wifi akan lebih optimal jika Satelit Multifungsi Satria telah diluncurkan, sebab Satria memiliki kapasitas yang besar yaitu 150 Gbps. Satelit Satria juga merupakan satelit khusus internet, yang cocok dengan teknologi ini.

Satria rencananya akan menghadirkan internet di 150.000 titik wifi, dengan rincian, sekolah 93.900 titik, kantor pemerintah daerah 47.900 titik, fasilitas kesehatan 3.700 titik, kantor kepolisian 3.900 titik, lainnya 600 titik.

Anang memperkirakan investasi untuk teknologi Super Wifi akan lebih mahal dibandingkan dengan wifi biasa, kendati belum dapat menyebutkan nilai pastinya karena masih dikaji. Perluasan infrastruktur membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dan dukungan pemerintah daerah, operator telekomunikasi dan pemangku kepentingan.



Kominfo Dorong Startup Berinovasi di Tengah Pandemi

<https://www.antaraneews.com/berita/1723222/kominfo-dorong-startup-berinovasi-di-tengah-pandemi>

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong perusahaan rintisan atau startup untuk berinovasi, demi memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia selama pandemi virus corona.

"Bersamaan dengan hal ini, Kementerian Kominfo pun sedang melakukan percepatan transformasi digital yang menitikberatkan pada empat poin utama yaitu pembangunan infrastruktur telekomunikasi, keamanan, dan perlindungan data pribadi, pembangunan SDM atau talenta digital, serta regulasi digital yang mumpuni," kata Menkominfo Johnny G Plate saat pembukaan Batch 4 Ignition Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, dikutip dari siaran pers, Minggu.

Johnny menyadari tidak semua perusahaan rintisan bisa tumbuh di masa pandemi ini, mereka yang bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, maritim dan transportasi mengalami tekanan pada situasi saat ini.

Beberapa startup binaan program tersebut, dikatakan Johnny, berinovasi untuk memecahkan masalah saat pandemi, seperti membuat alat pelindung diri dan membantu pedagang di pasar tetap bisa berjualan.

"Ini lah mengapa penemuan dan inovasi dibutuhkan untuk terus membantu perputaran ekonomi di dalam negeri, terutama di daerah dapat tetap berjalan," kata Johnny.

Kominfo mengutip data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi 5,32 persen secara *year-on-year*, dibandingkan periode yang sama pada 2019.

Sektor informatika tumbuh dari 9,6 pertama 2020 menjadi 10,88 pada kuartal kedua.

"Ini gambaran optimis, harapan, dan peluang perkembangan sektor komunikasi dan Informatika, khususnya ekonomi digital di tengah badai krisis COVID-19," kata Johnny.

Kegiatan bagian dari Gerakan Nasional 1.000 Startup ini bertujuan untuk mencari 10 startup pemula terbaik di 17 kota dan membantu mereka berkembang dan menjadi pionir *problem solver* di daerah masing-masing.

"Harapannya, tentu program ini dapat menghantarkan Indonesia untuk menghasilkan 1, 2, atau bahkan 3 unicorn baru pada tahun 2025," kata Johnny.

Program ini akan berlangsung selama tiga bulan di 17 kota, antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Kupang, Jayapura, Manado, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Medan, Batam, dan Pekanbaru.

Kementerian Kominfo menargetkan agar Indonesia dapat menghasilkan pendiri startup baru yang akan berinovasi untuk memecahkan masalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19.



Diterjang Corona, Satelit Internet Satria Optimis Tetap Meluncur 2023

<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5158894/diterjang-corona-satelit-internet-satria-optimis-tetap-meluncur-2023>

Jakarta - Merebaknya virus Corona atau COVID-19 yang membuat perekonomian dunia jadi macet saat ini, diyakini tidak akan mempengaruhi proses peluncuran dan dioperasikannya Satelit Republik Indonesia (Satria) pada tahun 2023.

Sebelumnya, pemerintah yang tengah berupaya pengadaan satelit satria untuk memancarkan akses internet ke berbagai pelosok Indonesia, harus terhadang gegara pandemi COVID-19. Namun hal itu saat ini telah diatasi setelah disepakatinya pembuatan satelit Satria ini pada tahun ini.

Kepastian konstruksi setelah dilakukannya penandatanganan Preparatory Work Agreement (PWA) proyek Satelit Republik Indonesia (Satria) antara PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai bagian dari konsorsium Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan perancang dan pabrik asal Prancis, Thales Alenia Space (TAS).

"Rencana tahun 2023 satelit Satria diluncurkan. Apakah optimis? sangat optimis," ujar Direktur Utama Badan

Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo Anang Latif, Jakarta, Kamis (3/9/2020). Bakti Kominfo sendiri dalam proyek satelit Satria ini berperan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Adapun, proyek ini juga dikerjakan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), di mana Kominfo bertindak selaku penanggungjawab proyek kerjasama (PPK).

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memaparkan setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi menuju peluncuran satelit Satria di tahun 2023.

"Jadi, ada tiga tahapan kritis atau penting. Pertama, proses produksi satelit di Toulouse, Prancis. Kedua, kendaraan transportasi satelit dari Toulouse ke tempat peluncuran roket. Dan, tahap ketiga itu adalah peluncuran itu sendiri, naik ke angkasa, sampai tidak sampai ke orbit," jelasnya.

"Rencana tahun 2023 satelit Satria diluncurkan. Apakah optimis? sangat optimis," ujar

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo Anang Latif, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Bakti Kominfo sendiri dalam proyek satelit Satria ini berperan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Adapun, proyek ini juga dikerjakan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), di mana Kominfo bertindak selaku penanggungjawab proyek kerjasama (PPK).

Di kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memaparkan setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi menuju peluncuran satelit Satria di tahun 2023.

"Jadi, ada tiga tahapan kritis atau penting. Pertama, proses produksi satelit di Toulouse, Prancis. Kedua, kendaraan transportasi satelit dari Toulouse ke tempat peluncuran roket. Dan, tahap ketiga itu adalah peluncuran itu sendiri, naik ke angkasa, sampai tidak sampai ke orbit," jelasnya.

Dirjen SDPPI: Pengendalian IMEI Lindungi Konsumen Perangkat HKT



Pemerintah menyiapkan pengaturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian perlindungan. Terutama untuk mendapatkan perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) yang legal dan berkualitas.

“Salah satu perspektif yang paling penting untuk diketahui bahwa IMEI ini hakikatnya adalah untuk melindungi masyarakat sehingga dapat menekan peredaran ponsel ilegal. Ada benefit yang nanti didapatkan masyarakat terkait perlindungan konsumen dari kehilangan atau pencurian dan sebagainya,” papar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, dalam Webinar “Optimalisasi Peraturan IMEI dalam Memberantas Ponsel Ilegal” di Jakarta (29/09/2020).

Membedah Buku 'Mewujudkan Indonesia 4.0: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia di Australia'

- Distance Learning (hal. 74) → menggarisbawahi pemanfaatan teknologi dan jaringan internet dalam pendidikan sehingga dimungkinkannya kegiatan pembelajaran tanpa pertemuan fisik.
- E-Government (hal. 66) → integrasi infrastruktur teknologi harus diikuti perubahan organisasi dan kebijakan yang adaptif.
- Interoperabilitas Data untuk Rekam Medis Elektronik (RME) (hal. 8) → pertukaran data kesehatan lebih cepat dan aman. Prinsipnya multidimensi, berkelanjutan, dan lintas organisasi.
- Real-Time Information untuk Manajemen Jalan (hal. 209) → pemanfaatan maps dari data urun daya untuk manajemen lalu lintas, sehingga tidak ada kemacetan dan mempermudah relayasa lalu lintas.
- Tantangan Making Indonesia 4.0 → disparitas fasilitas (device dan internet), kualitas SDM, interoperability data, transformasi pandangan untuk solusi basis IT.

Seluruh pembahasan di buku ini pada dasarnya membahas mengenai **inovasi teknologi dalam berbagai sektor dan aspek** (kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, hukum, institusi, kebijakan, energi dan keberlanjutan, infrastruktur, dll) yang salah satu **prasyarat penting untuk perubahannya** adalah dengan tersedianya **IoT/IICT/IICT**. Pada dasarnya, *big data, machine learning, artificial intelligence, internet of things*, dll akan optimal jika ada *integrate*.

Dirut BAKTI: Tak Ada Lagi Daerah Tak Terjangkau Sinyal

Pemerintah menargetkan seluruh Indonesia bisa terjangkau sinyal telekomunikasi. Menurut Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif, hal itu menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden RI menyatakan bahwa agar bagaimana transformasi digital bisa berjalan secara serentak dan kompak sehingga tidak ada satu penumpangpun yang tertinggal. Menkominfo juga sudah berkomitmen kepada Presiden bahwa tahun 2022, persoalan infrastruktur yakni sinyal sudah tuntas,” paparnya dalam Webinar Infrastruktur di Era Revolusi Industri 4.0 serta Bedah Buku “Mewujudkan Indonesia 4.0 : Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia di Australia” di Jakarta (28/09/2020).

Peringatan 75 tahun Hari Bakti Postel,

Semangat Dukong Percepatan Transformasi Digital



Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyatakan bahwa sejarah Hari Bakti Postel ke-75 pada 27 September setiap tahunnya merupakan sejarah kepahlawanan (heroik). Menurut Dirjen SDPPI, sejarah tersebut menginspirasi ekosistem Postel untuk menerjemahkan sejarah kepahlawanan Angkatan Muda Pos, Telegraf dan Telepon (AMPTT) dalam konteks kekinian.

“Yang paling jelas adalah kita dari bidang Kominfo termasuk juga khususnya Ditjen SDPPI harus bisa menerjemahkan untuk men-support percepatan transformasi digital. Jadi artinya itu, spirit dari kepahlawanan AMPTT itu diterjemahkan spiritnya tetap bekerja keras, menuntaskan dan mempercepat proses transformasi digital,” jelasnya di Jakarta (28/09/2020).

Menkominfo Apresiasi Peran Jurnalis

Bangun Narasi Bangkit Melawan COVID-19 Lewat AJK 2020

Melalui Anugerah Jurnalistik Kominfo Tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas dedikasi jurnalis di Tanah Air selama meliput pemberitaan seputar pandemi COVID-19 berikut tantangan besar yang dihadapinya di lapangan.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, penyelenggaraan AJK tahun 2020 mengangkat tema “Bangkit dari Pandemi COVID-19, Menuju Masyarakat Produktif”. Adapun kategori lomba antara lain mencakup liputan media cetak, media online, liputan TV, liputan radio dan foto jurnalistik. “Karya jurnalistik yang diikutsertakan adalah karya yang memiliki informasi yang bermanfaat, proporsional, mengedukasi publik dan harus memiliki keakuratan data dan memenuhi unsur-unsur jurnalistik,” jelasnya.

Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) 2020 “Bangkit dari Pandemi COVID-19: Menuju Masyarakat Produktif”

**ANUGERAH
JURNALISTIK
KOMINFO
2020**

▶ ▶ 6:26 / 8:53

Sediakan “Free Bayar”, Menkominfo: Kita Gunakan Beragam Teknologi Penuhi Akses Internet



Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis. Menurut Menteri Kominfo Johnny G. Plate, pilihan teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan wilayah.

“Kominfo melalui BLU BAKTI memilih beberapa alternatif teknologi sesuai dengan kondisi lapangan. Ada fiber optic, base transmitter station (BTS) atau radiolink. Untuk kontur tanah yang gunung dan lembag atau sulit bisa digunakan microwave link point to point. Kalau di sini dipasang Super Wifi,” jelasnya saat melakukan pengecekan perangkat Super Wifi di halaman Masjid Nurul Huda Gorontalo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (24/09/2020).

Bawaslu, KPU, Kominfo Perkuat Koordinasi Pengawasan Konten Pilkada di Internet

Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkuat koordinasi pengawasan konten kampanye Pilkada 2020 di internet. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memandang kampanye pilkada akan lebih banyak dilakukan secara dalam jaringan (daring).

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan atau yang akrab disapa Semmy menyebutkan setiap laporan yang diterima Kominfo akan diverifikasi bersama Bawaslu. “Kalau laporan (pelanggaran) berupa konten langkahnya adalah take down tetapi jika berupa website langsung kita blokir,” tegasnya. Bawaslu, KPU, dan Kominfo telah melakukan Nota Kesepakatan Aksi Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 28 Agustus 2020.



Dorong Inovasi di Tengah Pandemi, Kominfo Gelar 1.000 Startup Digital



Guna mendorong inovasi anak bangsa untuk penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia selama pandemi COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong penguatan literasi digital dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

“Bersamaan dengan hal ini, Kementerian Kominfo pun sedang melakukan percepatan transformasi digital yang menitikberatkan pada empat poin utama yaitu pembangunan infrastruktur telekomunikasi, keamanan, dan perlindungan data pribadi, pembangunan SDM atau talenta digital, serta regulasi digital yang mumpuni,” tutur Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Pembukaan Batch 4 Ignition Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, dari Jakarta (12/09/2020).

Prestasi Internasional di Tengah Pandemi,

GNLD Siberkreasi Jadi “Winner” WSIS Prizes 2020

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menjadi pemenang dalam kontes World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020. GNLD Siberkreasi dinobatkan sebagai Winner dari Action Lines WSIS C4 Capacity Building yang terkait dengan pemenuhan tujuan SDGs Goal 4: Quality Education.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan rasa bangga atas pencapaian GNLD Siberkreasi. “Saya berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi banyak pihak untuk semakin giat dalam melakukan kegiatan literasi digital dan mempersempit digital divide,” ungkapnya di Jakarta (07/09/2020).



Top 10 Hoaks

September 2020

1 Pamflet Jadwal Keberangkatan Kereta Api Nusa Ekspres

Beredar unggahan pamflet (selebaran) di media sosial yang berisi informasi jadwal keberangkatan Kereta Api Nusa Ekspres mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dalam pamflet itu dituliskan, rute keberangkatan kereta api Cilacap-Kroya-Purwokerto-Prupuk-Tegal (P.P) mulai tanggal 1 Oktober 2020 bisa dipesan dengan harga Rp15 ribu.

Setelah ditelusuri, diketahui informasi selebaran (pamflet) yang beredar itu adalah tidak benar alias hoaks. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui laman Twitter resminya @keretaapikita menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi hoaks yang beredar tersebut.

2 Maklumat KSAD untuk Siaga Aksi 20 Oktober 2020

Beredar sebuah postingan di Facebook mengenai maklumat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menyiagakan aksi 20 Oktober 2020. Maklumat tersebut menekankan beberapa hal dalam rangka menyambut aksi demo hingga tanggal 20 Oktober 2020. Pada postingan tersebut terdapat narasi bahwa, "Jenderal Andika keren. Menyikapi rencana aksi demo hingga 20 Oktober 2020 untuk persatuan dan jaga persatuan. Jangan mau dibenturkan antar komponen bangsa yang ingin merusak persatuan, jadi ingat dhawuh Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya: **BESAR-BESARKAN PARTAIMU, SETELAH BESAR NEGARAMU PERSATUAN INDONESIA.**"

Berdasarkan penelusuran, maklumat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menyiagakan aksi 20 Oktober 2020 itu tidak benar atau hoaks. Faktanya, dilansir Tempo.co, melalui pesan singkat, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Nefra Firdaus membantah adanya maklumat tersebut. Tanggal 20 Oktober mendatang merupakan peringatan satu tahun periode kepemimpinan Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Nefra mengatakan bahwa semua terkendali dan belum ada pemberitahuan mengenai akan adanya demo atau aksi lainnya

NTT News

Kepada yang terhormat,
Pimpinan MUI,
Pimpinan Pondok Pesantren,
Para Ulama, Kyai, Asatidzah,
Pimpinan Ormas Islam,
Tokoh Masyarakat dan Seluruh Rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke

Di Manapun Berada,

Assalamu'alaikum, Wa, Wa,

Sehubungan dengan rencana akan dilakukan vaksinasi Corona 19 pada seluruh Rakyat Indonesia yang disampaikan oleh Luhut Binsar Pangjatan, maka KAMI berharap kepada Majelis Ulama Indonesia, para Pimpinan Pondok Pesantren, Para Ulama, Kyai, Asatidzah, Dai, Tokoh Masyarakat dan Seluruh Rakyat Indonesia untuk mendaki rencana Vaksinasi Corona tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bisa jadi Vaksin mengandung unsur babi.
2. Bisa jadi Vaksin mengandung racun yang membahayakan.
3. Vaksinasi merupakan bagian dari sindikat perdagangan gelap internasional yang belum jelas jangkauannya.
4. Informasi Vaksinasi disampaikan oleh Luhut Binsar Pangjatan masih sangat diragukan kevaliditasnya. Sebab, dia bukan seorang muslim dan telah dianggap korang jujur, korang amanah dan berakhlak Negeri Komunis Cina.

Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia. Amin.

Wasalamu'alaikum, Wa, Wa,

Jakarta, 24 September 2020.

Dari
Febwan Pribumi dan Santri.

3

Vaksin Corona Asal Tiongkok Mengandung Babi

Beredar di sosial media Facebook sebuah pesan yang menyebutkan Vaksin Corona mengandung babi. Serta, Vaksin Corona dari Tiongkok tersebut merupakan bagian dari sindikat perdagangan gelap internasional. Dalam pesan berantai yang mengatasnamakan Relawan Pribumi dan Santri juga mengajak masyarakat menolak vaksinasi Virus Corona atau COVID-19.

Dikutip dari medcom.id, klaim Vaksin Corona dari Tiongkok mengandung babi adalah salah. Faktanya, Bio Farma memastikan Vaksin Sinovac dari Tiongkok tidak mengandung gelatin babi dan sertifikasi halalnya sedang diproses oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). PT Bio Farma (Persero) telah mendapatkan surat pernyataan dari Sinovac Biotech Ltd. bahwa vaksin yang diproduksi tidak mengandung gelatin babi. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir saat video conference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis, 27 Agustus 2020.

4

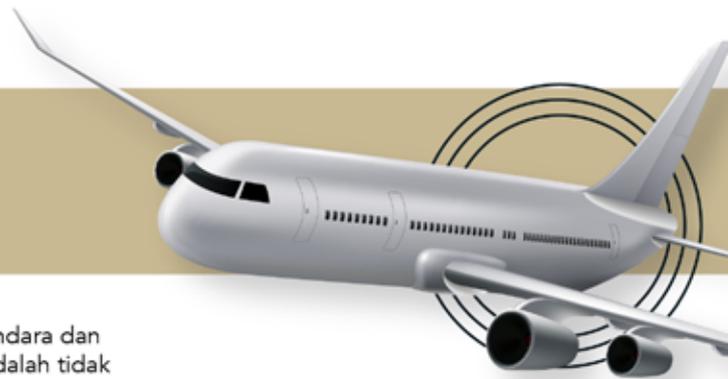
Penutupan Bandara dan Pelabuhan Laut di NTT

Beredar postingan di media sosial Facebook, menyebutkan kebijakan penutupan akses pelabuhan dan bandar udara oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Manggarai Barat (NTT) untuk mencegah penyebaran #covid19.

Berdasarkan hasil penelusuran, dilansir kupang.tribunnews.com

klaim penutupan bandara dan pelabuhan di NTT adalah tidak benar. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi NTT Isyak Nuka membantah isu yang berhembus soal rencana Pemprov menutup pintu-pintu masuk ke wilayah NTT. Isyak menjelaskan Pemerintah Provinsi NTT tidak melakukan penutupan bandara, pelabuhan laut atau

pelabuhan penyeberangan sehubungan dengan penanganan COVID-19. Meski angka paparan COVID-19 meningkat, namun pemerintah belum berpikir untuk menutup bandara dan pelabuhan sebagai pintu masuk ke wilayah NTT.



5

Informasi Grup WhatsApp untuk Wilayah Covid-19 dan Pembagian Vaksin

Beredar di media sosial WhatsApp sebuah pesan berisi ajakan undangan masuk grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi terkait wilayah penularan COVID-19 dan pembagian vaksin COVID-19.



Faktanya, dilansir dari Kompas.com, Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana

BNPB, Agus Wibowo menjelaskan bahwa informasi terkait pembuatan grup Whatsapp mengenai informasi wilayah penularan COVID-19 dan pembagian vaksin adalah tidak benar atau hoaks. Menurut Agus, pesan tersebut terindikasi pada aktivitas penipuan.

6

Mobil Esemka Keluaran Terbaru Siap Mengangkut Korban Covid-19

Beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan mobil jenis *pick up* dengan bagian kabin saja dan dua roda di depannya. Unggahan tersebut disertai narasi "Mobil Esemka keluaran terbaru Siap angkut korban covid 18. Kecepatan mobil ini susah dikendalikan#Hiburan".

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim video mobil Esemka siap mengangkut korban Covid-19 adalah tidak benar. Penelusuran mengarah ke situs Etransport.pl. Situs tersebut memuat foto yang identik dengan video klaim mobil Esemka siap mengangkut korban COVID-19, diberi judul "Polska-Chiny w dwie godziny". Video itu merupakan Graphics Interchange Format (GIF) yang merupakan animasi bergerak.



Beredar di media sosial Instagram sebuah gambar yang berisi narasi "Untuk mengetahui bahwa Indonesia itu negara komunis atau negara NKRI itu sangatlah mudah! Caranya cukup putar film G30S/PKI secara nasional. Kalau pemerintah enggak berani, berarti ini sudah negara komunis. Simpel kan caranya."

Dilansir dari Cekfakta.tempo.co, klaim yang menyebutkan tidak diputarnya film G30S/PKI secara nasional menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis merupakan klaim yang keliru. Pada tahun 1998, film ini berhenti diputar karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Sejumlah penelitian dan kesaksian yang telah dipublikasikan pun menyatakan sejumlah adegan dalam film itu tidak sesuai dengan fakta.

7

Tidak Diputarnya Film G30S/PKI Menunjukkan Indonesia Negara Komunis



8 Usai Teror Warga di Papua, OPM Siap Buru Banser

Beredar di sosial media Facebook, sebuah hasil tangkapan layar dari sebuah artikel yang mencatat situs online Sindonews.com, dengan artikel berjudul "OPM Tembak Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa Papua Setelah Itu Akan Cari BANSER".

Setelah ditelusuri, artikel berita tersebut telah disunting dari judul sebenarnya. Artikel asli berita tersebut berjudul "OPM Tembak Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa Papua" dimuat pada 20 September 2020 di situs Sindonews.com.



9 Donald Trump Sindir Isi Pidato Jokowi di PBB

Telah beredar unggahan di media sosial yang berisi tangkapan layar cuitan Twitter Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyindir isi pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dilansir dari laman situs Medcom.id, klaim Donald Trump menyindir Presiden Jokowi lewat cuitan di akun Twitter resminya adalah salah. Faktanya, cuitan tersebut adalah hasil suntingan dari cuitan asli Donald Trump di waktu dan tanggal yang sama dengan tangkapan layar tersebut. Cuitan aslinya diunggah pada 23 September 2020 pada pukul 5:53 AM.



10 Pengumpulan Massa PSHT di Kota Solo

Beredar sebuah informasi di media sosial Facebook para pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) akan turun lagi ke jalan dihimbau untuk warga kota solo dan sekitarnya untuk tidak keluar, atau yang punya kepentingan yang mendesak agar tidak keluar, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Faktanya, informasi tersebut dibantah oleh Humas PSHT Cabang Sukoharjo, Marjono mengatakan bahwa kabar pihaknya akan menurunkan massa itu tidak benar alias Hoaks. Kita tidak ada gerakan (turun jalan). Bahkan, sudah ada himbuan pada Kacab PSHT P16 Sukoharjo agar tidak bergerak dan diminta menjaga kondusifitas wilayah. Selain itu Marjono menambahkan, bahwa semua anggota juga sudah diminta untuk tidak memobilisasi anggota yang lain untuk mengikuti ajakan hal-hal yang merugikan organisasi.



Selain Fisik, Kesehatan Mental Juga Penting Dijaga Saat Pandemi

Sisters, semua berita tentang COVID-19 ditambah dengan peningkatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan nggak mungkin memengaruhi kesehatan mental lebih dari yang kita sadari.

Nah, untuk menghindari stres dan tingkat kecemasan yang semakin tinggi, simak beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental selama wabah penyakit virus Corona ini merebak, yuk!

1. Pahami Kecemasan

Psikolog Patricia Thornton menggambarkan kecemasan sebagai kekhawatiran yang diantisipasi tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan, mayoritas orang yang mudah cemas karena mereka virus ini tidak terlihat, dan siapapun bisa menjadi penular sehingga semua orang menjadi lebih waspada dengan apa yang kita sentuh dan tempat yang kita tuju.

"Kecemasan itu menular. Jika kamu melihat seseorang di dekatmu panik dan berkata, 'Dunia akan segera berakhir', kamu akan mulai khawatir tentang hal tersebut," kata Thornton.

2. Murka, Lalu Belajar

Thornton juga menyarankan untuk membiarkan diri merasa murka selama 15 menit kemarahan per hari, dan kemudian lanjutkan kehidupan. "Jangan menganggapnya sebagai kiamat. Lihatlah itu sebagai hal normal baru yang ditemukan. Tanyakan kepada diri sendiri, 'Bagaimana saya ingin menjalani hidup saya sekarang dengan kendala-kendala ini?' Dan batasi berbicara dengan keluarga jika mereka mulai membahas berbagai informasi yang tak jelas kebenarannya. Katakan, 'Kita hanya akan membicarakannya selama 15 menit,'" katanya.

3. Batasi Diri Tonton Berita

Menonton berita bereputasi baik, sekali sehari agar tetap up to date. Batasi tontonanmu hanya dengan mengikuti berita tentang hal positif saja, Sisters. Jika kamu secara nggak sengaja menemukan konten buruk, alihkan segera perhatianmu.

4. Beri pengetahuan pada anak

Jika kamu memiliki anak, batasi paparan berita pada mereka, karena itu bisa sangat berat bagi mereka untuk diproses. Menjadi sadar tentang bagaimana kamu berbicara tentang Covid-19 di sekitar anak-anak juga penting. Kamu bisa menunjukkan pada mereka untuk melihat bagaimana tenaga medis yang siap membantu ada di mana-mana, dan bagaimana masyarakat berkumpul bersama selama masa sulit ini.

Berikan mereka kegiatan bermanfaat seperti menggambar, menulis, atau menulis jurnal sehingga mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka.



5. Temukan Cara untuk Terhubung dan Tetap Sibuk

Menjaga rutinitas adalah penting bagi orang dewasa dan anak-anak yang dikurung di rumah. Cobalah untuk tetap pada rutinitas normalmu sebanyak mungkin. Pertahankan waktu tidur dan waktu terjaga yang sama. Pilih kegiatan yang menyenangkan atau memberimu tujuan seperti bermain papan permainan, membaca, menyusun puzzle, atau mandi. Jadikan itu sebagai bagian dari rutinitas harianmu untuk menjangkau teman dan keluarga.

6. Tambahkan Humor

Pengalaman yang menyenangkan dan bermakna mengurangi hormon stres kortisol dan meningkatkan hormon perasaan-baik seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin, para ahli menyarankan menambahkan humor untuk hari-harimu dengan membaca komik atau menonton film lucu dan acara komedi.

Hindari Corona, Lakukan Tips Aman Saat Buka Paket *Online*



Sisters, akibat virus corona atau COVID-19, kegiatan masyarakat di luar rumah pun harus dibatasi. Sebagai gantinya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, beberapa orang pun memilih untuk memesan bahan makanan atau keperluan lainnya melalui online.

Namun, apakah paket yang dikirimkan oleh pihak penjual terjamin keamanan dan kebersihannya? Dengan membeli paket berupa bahan makanan, atau barang lainnya, kamu bahkan tidak pernah tahu jika paket tersebut telah disentuh oleh berapa banyak tangan sebelum tiba di rumah.

Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir risiko terpapar virus corona selama masa social distancing?

Berikut telah dirangkum 5 tips aman menerima, membuka, dan membersihkan paket selama pandemi virus corona.

Catat dan terapkan di rumah, ya, Sisters!

Meminta pengiriman bebas kontak

Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan meminta pengiriman bebas kontak. Caranya adalah dengan meminta kepada pengirim untuk meninggalkan paket di depan pintu agar kamu tidak perlu melakukan interaksi.

Tak perlu takut menyinggung perasaan orang lain, karena sebagian besar layanan pengiriman makanan sudah melakukannya.

Bahkan, beberapa penyedia layanan juga mulai mengambil tindakan pencegahan dengan tidak meminta tanda tangan saat mengirim paket.

Pengiriman bebas kontak sebenarnya lebih ditujukan untuk keselamatan pembeli dan petugas pengiriman, mereka bisa sangat berisiko mengingat banyaknya orang yang berinteraksi dengan mereka dalam sehari.

Membuka paket di luar rumah dan menyemprotkan desinfektan

Saat memesan sesuatu secara online, barang yang kamu beli pasti akan dibungkus dengan plastik dan kardus terlebih dahulu. Namun, apakah corona masih bisa hidup di permukaan plastik atau kardus? Berita buruknya, virus corona dikatakan dapat hidup di atas permukaan kardus dan plastik! Nah, jika kamu ingin mengambil tindakan pencegahan ekstra, bukalah paket di luar rumah dengan menggunakan sarung tangan, Sisters. Kamu juga perlu menyemprotkan dan membersihkan isi paket dengan desinfektan terlebih dahulu, baru membawanya masuk ke dalam rumah.

Membuang kemasan paket di tempat sampah luar rumah

Sisters, setelah membuka paket di luar rumah dan menyemprotkan isinya dengan desinfektan, kamu juga perlu membuang kemasan pembungkus paket secepat mungkin.

Usai mengeluarkan isi paket, singkirkan segera kemasannya jauh-jauh. Kalau bisa, buanglah kemasan paket keluar rumah atau di tempat sampah luar. Jangan pernah sekali-kali membuangnya di tempat sampah dalam rumah, ya. Demi keamanan satu anggota keluarga kita, Sisters!



Mencuci tangan setelah menerima dan membuka paket

Langkah terakhir adalah dengan mencuci tangan setelah menerima dan membuka paket. Kamu mungkin sudah mendengar saran ini berpuluh kali, namun mencuci tangan adalah cara yang paling penting dan utama untuk meminimalisir risiko setelah kamu beraktivitas.

Jangan hanya dengan air mengalir, kamu juga harus mencuci tangan dengan sabun sesuai dengan anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah

Nah, Sisters, itulah beberapa tips aman menerima dan membuka paket belanja online. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, ya!

Selaku Badan Publik, kita berperan penting menyediakan informasi yang akurat bagi masyarakat. **Harus mampu mengklarifikasi hoaks dan disinformasi yang beredar, dan terus sebarkan informasi yang benar, bermanfaat untuk masyarakat.**

Salam keterbukaan informasi!

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika RI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841
majalahkominfonext@kominfo.go.id